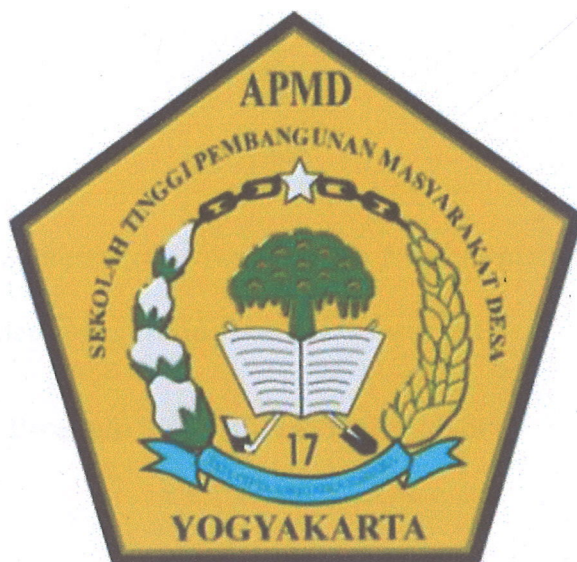


SKRIPSI

**SINEGRITAS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN
MANGROVE DI DESA SIGENTI SELATAN KECAMATAN TINOMBO
SELATAN KABUPATEN PARIGI MAOTUNG**



Disusun Oleh:

Mohammad Hidayat

20520079

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL

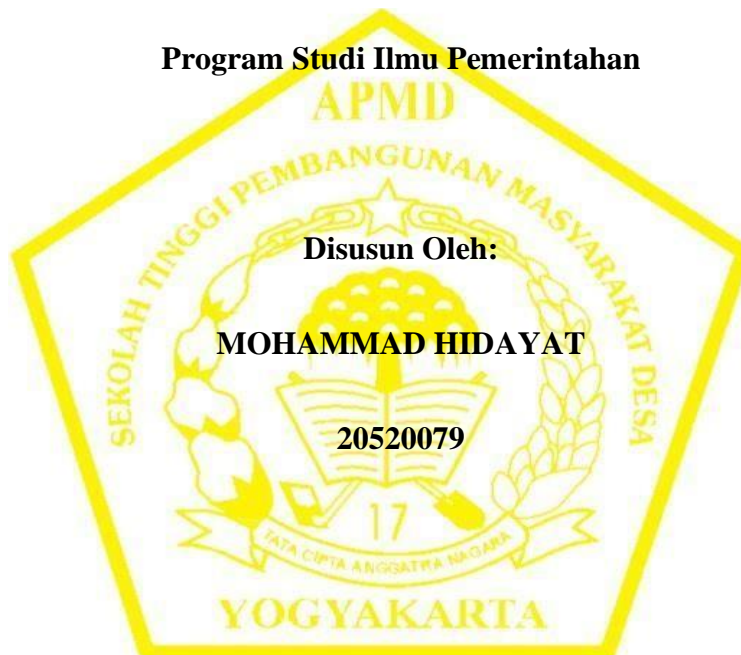
**SINEGRITAS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN
MANGROVE DI DESA SIGENTI SELATAN KECAMATAN TINOMBO
SELATAN KABUPATEN PARIGI MAOTUNG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Jenjang Pendidikan Starta Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

MOHAMMAD HIDAYAT

20520079

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Februari 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD APMD Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dra B Hari Saptaning Tyas M.Si

Ketua Penguji/pembimbing

2. Dr. Rijel Samaloisa

Penguji Samping 1

3. Minardi, S.IP., M.Sc

Penguji Samping 11

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan S.IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Hidayat

Nim : 20520079

Proram Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **(Sinegritas Stakholder Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Mautong)**” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku:

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta 18 Febuari 2025



Mohammad hidayat

20520079

MOTTO

FAA INNAMA'AL USRI YUSRO

(Artinya : Maka beserta kesulitan ada kemudahan)

PENDIDIKAN ADALAH INVESTASI TERBAIK UNTUK MASA DEPAN

(Malcolm X)

PEMIMPIN SEJATI ADALAH MEREKA YANG MENDORONG KESUKSESAN
BERSAMA

(Eleanor Roosevelt)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan cinta kasihnya sehinggah saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini dalam waktu yang tepat, serta dukungan dari kedua orang tua, keluarga dari pihak keluarga mama dan bapak, dan teman-teman. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya sayangi:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Rasman Mardjengi dan Ibu Suaida Dg. Pawata, saudara-saudari saya dari pihak keluarga besar bapak, dan dari pihak keluarga Ibu, yang selalu suport peneliti untuk menyelesaikan skripsi saya. Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan cinta tak terhingga yang telah diberikan kepada peneliti selama ini. Perjuangan serta doa kedua orang tua dan keluarga besar peneliti selama menempuh pendidikan membawa peneliti sampai ke tahap ini. Peneliti merasa bersyukur atas semua yang telah diberikan dan mengucapkan banyak terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada peneliti.
2. Kepada dosen pembimbing saya Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si, terimakasih yang telah sabar dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan penyusunan skripsi yang telah diberikan kepada saya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Teman-teman peneliti yang tercinta dan sudah menjadi keluarga di tanah rantau, Taufiq Munir, Nurhadi Dema, Umi Solehatin mubaraka, Rika, Jerianto, Ardiansyah Marjdengi, Yance, Jiahat Anugra, Fihat Anugra, Iqra, Arya Pratama, Mujahid Abdila, Mohamad Fadel, Gregoria Jeniver Harum, Silas, Marqus, Andra Halu, Ganang Raka Ariansyah, Jhodi Ahmad Farezi, Kristian Abelio. Agus Holo, Mas Toro. Yang telah banyak memberikan dukungan kepada peneliti dalam bentuk apapun kepada peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih.

Kepada para Dosen, Staff dan Kariawan Kampus saya Sekolah Tinggi Pembenguan Masyarakat Desa “APMD” tercinta, saya ucapkan terimakasih telah menjadi tempat saya belajar mencari ilmu, pengalaman, dan semoga menjadi kampus yang berkembang dan menghasilkan lulusan berprestasi beguana bangsa dan negara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah atas segala kemurahan dan cinta kasihnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sinegritas Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Magrove Di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Mautong” penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu sayarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, agar dapat terselesaikan dengan baik

Penulis sangat menyadari atas kekurangan dan ketidak sempurnaan dari tulisan ini. Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berkat bimbingan dan arahan dosen, keluarga, teman-teman dan pihak lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S. Ip., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Analius Giawa, S. Ip, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi
5. Bapak Dr. Rijel Samaloisa dan Bapak Minardi S.IP.,M.Sc selaku dosen penguji skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sigenti Selatan yang memberikan waktu dan tempat serta memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaran skripsi dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak dan meminta maaf apabila ada yang tidak ditulis dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan penulis di masa akan mendatang. Dengan penuh rasa terimakasih penulis berharap akan ada nilai kemanfaatan dari skripsi ini baik bagi peneliti sendiri maupun orang lain yang akan membacanya.

Yogyakarta 18 Februari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Hidayat' with a stylized flourish at the end.

Mohammad Hidayat

INTISARI

Beberapa Desa yang di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Mautong Desa Sigenti Selatan memiliki kawasan wisata hutan mangrove yang di kelolah oleh kelompok Masyarakat, penyebab kerusakan Hutan Mangrove di Desa Sigenti Selatan ada dua faktor yaitu peristiwa alam banjir, abrasi, letusan gunung merapi, puting beliung, gempa bumi dan sunami, tetapi bila di teliti bencana seperti ini bisa juga akibat ulah manusia, hal yang paling krusial itu dalam kerusakan Kawasan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan dilakukan oleh Masyarakat yang melakukan aktivitas penebangan pohon mangrove terus menerus dilakukan sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan data yang di peroleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, subjek penelitian Kepala Desa, Ketua Kelompok Pengelola Wisata, Sekretaris Desa sekaligus Sekretaris Kelompok Pengelola Wisata, Anggota Pengelola Wisata 2 orang, Anggota BPD (badan Permusyawaratan Desa), Kepala Dusun 2 dan Dusun 3, Nelayan 2 orang, Masyarakat, Analisis penelitian ini Sinegritas Stakholder dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove.

Hasil penelitian ini menunjukan tentang Sinegritas Stakeholder dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Mangrove, Pemerintah Desa hanya melibatkan kelompok pengelola hutan mangrove sebagai mitra dalam perencanaan pengembangan hutan Mangrove, serta beberapa Masyarakat dusun 2 dan 3, tidak melibatkan Masyarakat lokal.

Kata Kunci : Sinegritas Stakeholder Pengelolaan Hutan Mangrove

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Akademis	5
2. Manfaat Praktis	6
3. Literatur Rivew	6
G. Kerangka Konseptual	13
1. Sinergitas	13
2. Stakeholders.....	16
3. Pengelolaan Hutan Marngrove (perlindungan tentang kerusakan Hutan Magrove)	19
A. Pengertian Pengelolaan	19

B.	Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik	19
H.	METODE PENELITIAN	24
1.	Jenis Penelitian	24
2.	Unit Analisis	24
3.	Teknik Pengumpulan Data	26
4.	Teknik Analisis Data	28
BAB II	30	
	PROFIL DESA SIGENTI SELATAN, KEC.TINOMBO SELATAN, KAB. PARIGI MAUTONG	30
A.	Gambaran umum Desa Sigenti Selatan dan Sejarah Desa tahun 2024	30
B.	Keadaan Geografi	32
C.	Keadaan Demografis	34
D.	Pemerintah Desa Sigenti Selatan	41
E.	Deskripsi Wisata Hutan Mangrove	42
BAB III	45	
	SINEGRITAS <i>STAKEHOLDER</i> DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA SIGENTI SELATAN, KECAMATAN TINOMBO SELATAN, KABUPATEN PARIGI MAUTONG	45
A.	Sinegritas Stakeholder Dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan	46
B.	Sinegritas Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan	51
C.	Sinegritas Stakeholder Dalam Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan	54
D.	Sinegritas Stakeholder Dalam Pengawasan Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan	57
BAB IV	65	
	KESIMPULAN DAN SARAN	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	68
	DAFTAR PUSAKA	70

PANDUAN WAWANCARA.....	72
LAMPIRAN	74
HASIL DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mangrove jenis hutan yang tersebar diseluruh Indonesia dan di pengaruhi oleh pasang surut air laut. Salah satunya di Desa Sigeni Selatan memiliki luas lima hektar, meskipun fungsi ekologi dan ekonomi hutan mangrove sangat penting bagi masyarakat lokal, regional, nasional, dan global, perkembangan pemukiman, pertanian, perikanan, dan industri telah menempatkan hutan mangrove di bawah tekanan yang signifikan.

Pasal 33 ayat 3 undang-undang 1945, menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini bermaksud bahwa pendayagunaan kekayaan alam dimaksudkan sebesar-besarnya ke makmuran rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, yang dalam artinya segala kekayaan alam yang ada harus digunakan secara tepat untuk kemakmuran bersama sehingga alam bisa terjaga untuk memberi penghidupan kepada manusia.

Untuk mengatur masalah kerusakan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) menetapkan peraturan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Menurut pasal 1 angka 17 UU PPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria standar kerusakan lingkungan hidup. Sudah jelas bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan dan dilestarikan serta dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemenuhan kehidupan.

Hutan mangrove sebagai sumber daya alam mempunyai peranan dan fungsi sangat penting di wilayah pantai. Meningkatnya kebutuhan akan hidup masyarakat pesisir berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pesisir, meningkatnya aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup konverdi lahan baik itu untuk tambak ikan atau udang dan juga adanya aktivitas penebangan liar untuk kayu bakar dan arang yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kerusakan hutan mangrove.

Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong. Terletak di indonesia pulau Sulawesi Tengah mempunyai sumber daya alam yang masih melimpah seperti hutan mangrove yang dimiliki Desa sebagai tempat wisata. Disisi lain masyarakat Desa Sigenti Selatan mayoritas Petani, Nelayan dan Peternak Hewan Sapi, kambing.

Penyebab kerusakan hutan mangrove yang ada di Desa Sigenti Selatan ada dua faktor yaitu akibat peristiwa alam biasanya banjir, abrasi, letusan gunung berapi, puting beliung, gempa bumi dan tsunami merupakan beberpan contoh bencana alam. Bencana-bencana ini lah yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup, akibat peristiwa alam tetapi bila diteliti bencana-bencana seperti ini bisa juga akibat ulah manusia. Hal yang paling krusial dalam kerusakan hutan Mangrove yang ada di Desa Sigenti Selatan ini dilakukan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas penebangan pohon secara liar, hal ini yang terus dilakukan oleh masyarakat setempat yang secara terus-menerus sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang memiliki dampak yang sangat buruk seperti penurunan atau kemunduran mutu lingkungan dengan ditandai hilangnya sumber daya

tanah, air, udara, sampai mengakibatkan punahnya flora dan fauna serta kerusakan ekosistem.

Walaupun tidak di semua wilayah Indonesia, hutan mangrove memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Mangrove melakukan peran penting sebagai penghubung antara daratan dan lautan. Mangrove berfungsi sebagai filter untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan lingkungan utama, dan sebagai sumber makanan bagi biota laut (pantai) dan biota darat. Jika tidak ada mangrove, produksi laut dan pantai akan berkurang.

Dari beberapa Desa yang berada di Kecamatan Tinomboh selatan, Kabupaten Parigi Mautong, Desa Sigenti Selatan memiliki kawasan wisata hutan mangrove Vatu Lompa yang berada di Desa Sigenti Selatan salah satu tempat objek wisata yang ada di Kecamatan Tinomboh Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, wisata hutan mangrove ini dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Sigenti Selatan, perkembangan wisata hutan mangrove vatu lompa Desa Sigenti Selatan yang mana dikelola oleh kelompok masyarakat, sangat populer dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar daerah Kabupaten Parigi Mautong pada awal berdirinya kawasan wisata hutan mangrove Desa Sigenti Selatan. Akan tetapi kawasan hutan mangrove Vatu Lompa Desa Sigenti Selatan menjadi penurunan pengunjung wisata, yang mana kawasan wisata hutan mangrove vatu lompa ini tidak lagi beroperasi seperti sediakalah sebagai tempat wisata dan sampai saat ini tidak lagi berfungsi sebagai tempat wisata hutan mangrove vatu lompa yang dikelola oleh kelompok masyarakat desa sigenti selatan. Karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa untuk melindungi dan mengembangkan potensi alam, untuk

pengembangan tempat wisata sebagai penopang ekonomi masyarakat Desa Sigenti Selatan.

Ekosistem mangrove dapat mencegah erosi pantai, angin kencang, dan gempuran ombak yang kuat, serta mencegah intrusi air laut. Ekosistem mangrove dapat membantu kesuburan tanah, sehingga segala macam biota perairan dapat tumbuh dengan subur sebagai makanan alami bagi ikan dan binatang laut lainnya. Ekosistem mangrove dapat membantu perluasan daratan ke laut dan pengolahan limbah organik. Ekosistem mangrove juga dapat digunakan untuk budidaya ikan, udang, dan daun laut.

Jika dilihat dari kasus yang terjadi yaitu kerusakan hutan mangroven ini kita lihat dalam perspektif (*governance*) sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam satu negara. Yang dimana pemerintahan disini sebagai aktor utama atau motor penggerak seperti memerintah, mengatur dan mengurus bersama masyarakat setempat, dalam hal ini yang dimana pemerintah Desa Sigenti Selatan harus dapat membuat suatu kebijakan dalam menangani kasus kerusakan hutan mangrove yang dilakukan warga setempat, agar hutan mangrove tetap terjaga kelestariannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Sigenti Selatan?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana sinegritas *stakeholder* dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Sigenti Selatan, terdapat empat indikator yaitu :

1. Sinergitas *stakeholders* dalam Perencanaan pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan
2. Sinergitas *stakeholders* dalam pelaksanaan / aktivitas pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan
3. Sinergitas *stakeholders* dalam pengorganisasian pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan
4. Sinergitas *stakeholders* dalam pengawasan pengembangan hutan mangrove dessigenti selatan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penenelitian ini adalah untuk mengetahui Sinegritas *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahun dan pembelajaran tentang pelindungan kawasan hutan mangrove Desa Sigenti Selatan

sebagai objek wisata, untuk meningkatkan potensi masyarakat dan sumber daya alam guna mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan, panduan bagi masyarakat Desa Sigenti selatan untuk berfikir mengembangkan dan melindungi potensi sumber daya alam (hutan mangrove) serta menjadi acuan atau pandua bagi pemerintah dasa dalam meberikan perlindungan kawasan hutan mangrove sebagai tempat kawasan objek wisata.

3. Literatur Rivew

Pertama Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Volume 8, No 2, Mei 2023 karya Abdullah dengan judul PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN KOTA DAN HUTAN MANGROVE DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA. Pengelolaan ialah sama dengan Manejemen, dipahami sebagai satu peroses mebedakan-bedakan atas perencanaan, pengorganisasikan, penggerakan serta pengawasan dengan menerapkan ilmu maupun seni guna memenuhi tujuan tertentu. Ekhowisata ialah gasgasan pengembangan pariwisata berkelanjutan berupaya melindungi serta melestarikan lingkungan (alam Serta Budaya) serta mendorong keterlibatan masyarakat pada pengelolaan yang konservatif, sehinggah bermanfaat bagi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Ekhowisata Tanaman Hutan Kota dan Hutan Mangrove dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskritif, dangan pengumpulan data Observasi, Dokumentasi,

dan Wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Pengelolaan dan Konsep Ekowisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan ekowisata Taman Hutan Kota dan Hutan Mangrove dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah belum optimal baik dari pengelolaan yang dilihat melalui perencanaan, perorganisasian, pergerakan, juga pengawasan, dan konsep ekowisata yang meliputi prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, juga prinsip ekonomi.

Jurnal Indobiosains. Vol 1. No. 1 Edisi Februari 2019 karya Iskhandar, Moh Rasyid Ridho dengan judul RESTORASI HUTAN MANGROVE TERDEGRADASI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan di wilayah pesisir yang memiliki fungsi ekologis yang penting. Walaupun hutan mangrove memiliki banyak fungsi penting di wilayah pesisir namun sering kali pemanfaatan yang berlebihan dan tidak berorientasi pada berkelanjutan telah menyebabkan degradasi terhadap ekosistem hutan mangrove. Penyebab utama degradasi hutan mangrove di dunia adalah akibat pengaruh antropogenik berupa aktivitas pertanian, perkebunan, tambak ikan dan udang, pembangunan pemukiman, penebangan kayu (legal logging dan illegal logging), pencemaran pertambangan dan tambak garam. Oleh karena itu peran masyarakat lokal sangat diperlukan dalam upaya mengontrol laju penggunaan hutan mangrove. disamping itu masyarakat lokal yang hidup di wilayah pesisir merupakan ujung tombak dalam merestorasi kawasan hutan mangrove karena mereka membutuhkan keberadaan hutan mangrove yang lestari serta memiliki kearifan lokal yang telah teruji. Fungsi ekologis dan ekonomis ekosistem hutan mangrove dapat dipelihara melalui peningkatan kesadaran

masyarakat akan pentingnya pelestarian, sehingga tercapai optimalisasi dan keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut.

Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Perkebunan. Vol 5 No 1 Januari 2023 39-46 karya Diny Evitasari, Sukendah. Dengan judul DAMPAK DEGRADASI DAN STRATEGI HUTAN MANGROVE DALAM MENJAGA EKOSISTEM. Adapun hasil penelitian ini adalah intraksi hutan mangrove dan lingkungannya mampu menciptakan kondisi yang sesuai bagi berlangsungnya proses biologis beberapa organisme akuatik, daerah perairan hutan mangrove memberikat tempat berlangsungnya proses biologi bagi biota laut, apabila lingkungan relatif stabil dan tidak terlalu berfluktuatif tergantung pada priode tertentu serta tersedianya makanan bagi berbagai jenis biota. Salah satu penyebab utama terjadinya penurunan kualitas lahan mangrove akibat penggunaannya sebagai daerah pembangunan limbah, penggalihan lahan menjadi pemukiman penduduk, kawasan pariwisata maupun tambak masrakat.

Jurnal Of Tropical Marina Science. Vol.4(1):40-48, April 2021. Karya Dian Iswandaru, Rudi hilmanto, Indra Gumay Fabryano dengan Judul PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP HUTAN MANGROVE. Persepsi masyarakat di wilayah pesisir perkotaan terhadap ekosistem mangrove menjadi faktor penting dalam perencanaan sterategi keberlanjutan. Penelitian ini betujuan untuk menjelaskan persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove di kelurahan kota karang, kota bandar lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisisioner dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Skala Likert dan selanjutnya dideskripsikan secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 50% persepsi masyarakat

terhadap mangrove masuk kedalam kategori sedang(netral). Kondisi ini terjadi akibat masyarakat cenderung ragu dalam menentukan sikap terhadap hutan mangrove. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut yaitu rendahnya pengetahuan, jenjang pendidikan, kesadaran dan ketersediaan waktu masyarakat, serta minimnya informasi mengenai hutan mangrove akibat belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi (penyuluhan).

Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 10 Issue 1: 1-7 2012. Diarto, Boedi Hendrarto, Sry Suryoko. Dengan Judul. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MANGROVE TUGUREJO DI KOTA SEMARANG. Potensi dan keunikan sumber dayaalam pada kawasan Hutan mangrove memiliki peranan sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat pesisir. Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu upaya dalam mendukung pengembangan wilayah pesisir secara optimal, bijaksana dan tanggung jawab, tentunya dengan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait serta dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan. Antusiasme, keinginan dan harapan serta adanya keperdulian sosial masyarakat setempat merupakan bentuk partisipasi dalam upaya pengelolaan lingkungan, adanya partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam upaya pengembangan wilayah pesisir.

Jurnal Ilmu Lingkungan. Volume 15 Issue 2 (2017) 117-123. Bakti Utomo, Sri Budiastuti, Chatarina Muryani. Dengan Judul. STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TANGGUL TLARE KECAMATAN KUDUNG KABUPATEN JEPARA. Pengelolaan hutan mangrove adalah hal yang penting dalam

mengupayakan pelestarian lingkungan kawasan pesisir. Dampak yang di timbulkan dengan adanya rehabilitasi hutan mangrove di daerah penelitian dalah meningkatnya hasil tangkapan, mengurangi abrasi pantai, menahan tiupan angin laut, semakin banyak tangkapan biota (udang, kepiting karang) di pesisir, dan menjadikan kawasan tersebut menjadi daera objek wisata. Sterategi yang perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan mangrove di antaranya yaitu memanfaatkan potensi yang ada dengan melakukan penanaman pohon mangrove, dan melindungi pohon yang sudah ada, mebentuk kawasan hutan lindung konservasi hutan mangrove agar kawasan hutan mangrove tetap terjaga dan lestari, dan memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan mangrove dan memanfaatkan sebagai tempat objek wisata mangrove.

Jurnal Masalah-masalah Hukum, jilid 47 No.4 oktoter 2018 Halaman 479-497.
Karya Bambang Eko Turisno. R.Suharto, Ery Agus Priyono, dengan judul **PARAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGARAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA**. Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir sebagai tempat wisata. Metode pendekatan yang di gunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang digunakan data skunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat, kewenangan pemerintah, wisata mangrove, konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupunpenunjang lainnya. Hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata, penanaman hutan

mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan tehnik berjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jurnal Spasial Volume 7 . No. 3, (2020) karya Ghizella O. Ramena, Cynthia E. V. Wuisang dan Frits O. P. Siregar. Dengan judul. PENGARUH AKTIVITAS MASYARAKAT TERHADAP EKOSISTEM MANGROVE DI KECAMATAN MANAGU. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Pesisir merupakan wilayah kaya akan potensi alam yang sejak lama dimanfaatkan oleh manusia. Wilayah pesisir Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2017 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya pesisir terdiri atas sumber daya hayati meliputi, ikan, terumbu karang, padang lumun, mangrove dan biora laut lain. Sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya bantuan meliputi infrastruktur laut terkait kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan. Kawasan pesisir dimanfaatkan untuk pemukiman, transportasi, industri, pertambangan, agribisnis, rekreasi, dan pariwisata. Pemanfaatan sumber daya pesisir ini tentunya berpengaruh terhadap keadaan ekosistem pesisir, salah satunya ekosistem penting yang berada di pesisir dan ekosistem mangrove. Hutan mangrove merupakan sumber daya alam daerah tropis yang mempunyai manfaat besar baik secara ekologi maupun ekonomi.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol V, No 2 Oktober 2015, karya Rahman ,Ihyani Malik, Hamrun. Dengan judul KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA TONGKE-TONGKE KABUPATEN SINJAI. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pemerintah daerah dengan kelompok Masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Tongke-tongke kabupaten sinjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk kemitraan yang terjalin yaitu bentuk pseudo-partnership atau kemtraan semu yang merupakan sebuah persekutuan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih, namun tidak melakukan kerja sama secara sederajat. Penanaman dan perlindungan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat dikatakan cukup baik dan berpotensi untuk mewujudkan hutan mangrove berkelanjutan.

Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan. Vol. 1 Edisi Khusus. Karya Edi Mulyadi, Okik Hendriyanto, Nur Fitriani. Dengan judul. KONSERVASI HUTAN MANGROVE SABAGAI EKOWISATA. Untuk menindak lanjuti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau maka perlu dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah untuk menyusun sterategi pengembangan dan pengolahan hutan mangrove di sungai Wain Balikpapanmelalui konsep Ekowisata berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu : aspek teknis (jenis magrove, pola dan teknik penanaman mangrove) aspek sosial (jumlah dan kepadatan penduduk peran serta kesadaran masyarakat dalam pengelolahan hutan mangrove), aspek kelembagaan (dukung pemerintah kota, pemerintah desa, dukungan peraturan perundangan, dan kalangan perguruan tinggi) dengan tujuan untuk

membentuk suatu kepedulian masyarakat dan unsur ekowisata dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove.

Berdasarkan literatur review di atas tentunya memiliki persamaan dan perbedaannya, persamaannya penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan hutan mangrove bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian hutan mangrove. sedangkan perbedaannya penelitian saya berupaya akan menemukan temuan baru dilapangan terupaya bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam menangani kerusakan hutan Mangrove dengan lokasi yang berbeda serta konsep pengelolaan yang berbeda juga dengan melibatkan masyarakat sebagai pengelola utama dalam kawasan wisata hutan mangrove.

G. Kerangka Konseptual

1. Sinergitas

Sinegritas antara aktor kepentingan merupakan satu hal yang sangat penting dalam pencapaian satu tujuan organisasi. Tak ubahnya keilmuan administrasi publik yang menganggap administrasi sebagai kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, sinegritas juga merupakan kombinasi atau paduan unsur bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan libih besar ketika dibangun secara baik bersama *stakeholder* yang adadidalamnya (Najianti dalam Rahmawati etal. 2011). Berdasarkan hal tersebut sinegritas mempromosikan dirinya sebagai katalisator dari keilmuan administrasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal.

Sinegritas dapat terbangun melalui komunikasi dan kordinasi. Dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yang mana disatu sisi merupakan kegiatan seseorang memindahkan stimulus guna mendapatkan tanggapan dan disisi lain sebagai kegiatan mengapai stimulus tersebut (Sofyan dan Garniwa 2007). Disamping komunikasi, sinegritas juga membutuhkan koordinasi yang merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama (silalahi 2011). Dalam keilmuan admistrasi publik konsep sinegritas merupakan satu cara yang harus dilakukan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini meliputi pemerintah tingkat pusat sampai dengan pemerintah tingkat bawah atau sering kita kenal dengan istilah pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan aktor penting yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan

Sinegritas dapat di bangun dari rasa kepercayaan, adanya rasa keterbukaan kerja sama yang baik antara individu untuk membuat sebuah kreatifitas guna menemukan pemecahan masalah atau ide baru dalam arternatif jalan ketiga (jalan tengah) tanpa menimbulkan konflik sosial dengan individu lainnya. Sinegritas dapat terjadi dalam beberapa aktor dalam organisasi maupun kelompok. Hubungan sinegritas dapat berkembang dan mengalir antara individu, kelompok dengan kerja bersama secara terus menerus satu dengan lainnya, sehingga di antara mereka dapat berfikir dan bergerak sebagai satu kesatuan.

Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal mengartikan sinergitas : “Kombinasi atau paduan unsur bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri-sendiri, selian gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bilah komponen-komponen yang ada mampu berfikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”.

Menurut (Sulasimi, 2009:240) Sinegritas merupakan pendekatan yang paling efektif untuk memecahkan persoalan dari pada sikap yang apatis ataupun konfrontasi. Sinegri berbeda dengan kompromi karena, dalam komprimi pihak-pihak yang terlibat harus mengorbankan sebagian dari tujuan agar bisa saling berkerja sama. Beberapa pendapat seperti Kanter, menyatakan bahwa sinergi adalah interaksi dari usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar dan melampaui apa yang didapat dilakukan masing-masing unit jika melakukannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas sinegritas yaitu kegiatan atau tindakan bersama. sedang dibangun dan dipastikan kemitraan yang dapat menjalani hubungan dengan pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Sehingga dapat menumbukan rasa solidaritas antara sesama. Dalam hal ini sinegritas ialah satu gabungan antara kinerja dari satu pihak dengan pihak yang lain dalam rangka untuk membuat suatu program atau satu rencana kedepan agar kinerja yang hanya dilakukan oleh satu pihak itu menjadi lebih produktif dan masif. Dan pentingnya peran pemerintah desa untuk membangun kerja sama dengan pihak-pihak

lain dalam perlindungan kawasan hutan mangrove batu lampa sebagai tempat wisata. Sehingga atau menjadikan tambahannya kualitas kinerja pihak itu sendiri.

2. Stakeholders

Stakeholders memiliki sejarah yang panjang dan penerapan yang luas. Awalnya sekitar tahun 1708, istilah stakeholder diartikan sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab fidusia, kemudian makna *stakeholders* berkembang menjadi berkembangmenjadiorang yangmemiliki saham atau kepentingan dan menjadi penuntut terhadap pihak-pihak yang mungkin ataupun tidak memiliki tanggung jawab. Freeman (1984). Mendefinisikan stakeholder sebagai satu kelompok atau individu yang bisa mengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan satu organisasi. Pada tahun 1980-an istilah stakeholder mulai masuk dalam teori maupunpraktik manajemen publik dan nirbala yang diartikan sebagai orang, kelompok atau organisasi yang harus diperhitungkan oleh pemimpin, manajer, dan staf garis depan.

Stakeholder untuk kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dan menjadi semakin responsif dalam memberikan pelayanan. Adanya pandangan bahwa tata kelola sektor publik harus bisa dilakukan secara lebih kolaboratif, juga akhirnya melahirkan suatu strategi tatakelola yang hari ini dikenal sebagai *collaborative governance*. Konsep tentang pengelolaan pemerintah berbasis kolaborasi tersebut, pada intinya menjelaskan mengenai pentingnya keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk secara bersama-sama membuat kesepakatan dalam proses perumusan kebijakan publik. Hal ini dianggap penting, karena dengan semakin

tingginya diversitas perspektif atau perbedaan pandangan, maka akan mampu melahirkan rumusan kebijakan yang lebih tepat dan bijaksana.

Stakeholder yang merupakan individu atau kelompok yang dapat memengaruhi maupundipengaruhi oleh satu aktivitas dan tujuan organisasi tidak ada tanpa dukungan organisasi itu sendiri (friedmandan miles 2006). Dalam pencapaian satu tujuan analisis efektifitas organisasi berupa pemahaman hubungan antara steholder satu dengan yang lainnya. Sebagai kelompok atau individu yang memengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas organisasi. Keberadaan berbagai individu dan kelompok yang mendukung dan memengaruhi organisasi diakui dalam konsep *stakeholders*. Sebagai mana pencapaian tujuan organisasi dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh *stakeholders* (freeman 1984). Terdapat banyak kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi namun tidak dapat disebut sebagai stakeholder ketika dukungan mereka tidak lagi diperlukan tidak diperhatikan ataupun tidak dianggap sebagai stakeholder oleh satu organisasi. Selain itu terdapat individu maupun kelompok yang menganggap dirinya sebagai skateholder. Dari satu organisasi tapi tanpa pertimbangan mereka untuk menjadi *stakeholders*.

Sementara itu secara konseptual, pemahaman mengenai kalaborasi sendiri dapat ditinjau dan didenifisikan melalui berbagai perspektif tergantung dari mana konteks seseorang memahaminya. Secara makna kata, mengutip pandangan (Russell Liden), Kalaborasi (*Collaboration*) pada dasarnya diartikan sebagai upaya bersama dan rasa memiliki. Hasil akhir dari kalaborasi bukanlah milik “saya” atau “anda” melainkan milik bersama. Karenanya menurut Liden, merujuk pada pemahaman tersebut kalah

borasi jadinya dipahami ketika orang-orang dari berbagai organisasi menghasilkan sesuatu secara kolektif melalui upaya yang dilakukan secara bersama.

Menurut Hadi (2011:93) stakehorders adalah semua pihak, internal, maupun external, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, stakehorders merupakan pihak internal maupun external seperti : pemerintah, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga pemerhati lingkungan.

Berdasarkan penjelasan yang atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori stakehorders menjelaskan tentang kerja sama atau kalaborasi, khususnya kegiatan kerja sama dalam usaha penyatuan pemikiran. (Wood dan Gray 1991) mengemukakan bahwa kalaborasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang meemandang aspek-aspek berbeda dari satu masalah dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan-perbedaan yang mereka miliki dan melakukan pencarian terhadap solusi mengenai apa yang mungkin dapat meraka lakukan yang melampaui visi mereka yang terbatas.

Berdasarkan pendapat para ahli, *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh tujuan dan aktivitas organisasi. stakeholder sebagai pihak yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, dan keberadaannya diakui dalam teori serta praktik manajemen publik. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan publik, untuk menghasilkan kebijakan yang lebih bijaksana melalui keberagaman perspektif. Oleh karena itu, stakeholder mencakup pihak internal dan eksternal yang memiliki pengaruh langsung

maupun tidak langsung terhadap organisasi, dan keberhasilannya bergantung pada kerjasama dan koordinasi antara mereka.

3. Pengelolaan Hutan Mangrove (perlindungan tentang kerusakan Hutan Mangrove)

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan secara umum pengelolaan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nogroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses pengurusan dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

B. Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam

membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dalam kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkan pengelolaan yang baik dalam organisasi. Tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi afektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negative terhadap reputasi mereka yang wakilnya. Pengelolahan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Terry (2006: 342) menjelaskan pengelolaan yang baik meliputi : *Pertama*, perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiran dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang di kehendaki. *Kedua*, perngorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikaikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaiaan tujuan yang ditetapkan. *Ketiga*, penggerakan (*Actuating*) adalah menetapkan semua anggota dari pada kelompok agar berkerja secara sadar untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. *Keempat*, pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bila mana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

- Tujuan perencanaan menurut Laksami dkk (2015: 31) adalah :
 - a) Mengarung/mengimbangi ketidak pastian perubahan diwaktu yang akan datang.
 - b) Memutuskan perhatian kepada sasaran
 - c) Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
 - d) Memudahkan pengawasan
- Tujuan pengorganisasian menurut Laksami dkk (2015: 31) adalah :
 - a) Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga kesimbangan beban kerja dalam satu organisasi yang sehat
 - b) Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan
 - c) Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan pada pihak lain. Atau mengkambing hitamkan orang lain.
 - d) Memudahkan kordinasi, tidak hanya mengkordinasikan sumberdaya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran fasilitas dan peralatan.
- Tujuan pergerakan menurut terry adalah :
 - a) Menciptakan kerja sama yang lebih efesien
 - b) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf
 - c) Menumbakan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
 - d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan partisipasi kerja staf

- e) Membuat organisasi secara dinamis
- Tujuan pengawasan menurut Sukarno adalah :
 - a) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
 - b) Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperhatikan
 - c) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau berkerja
 - d) Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan

Dari sudut pandang ilmu perlindungan hutan, kerusakan hutan dapat disebabkan oleh hama dan penyakit, bencana alam tertentu, penggembalaan, dan satwa liar; namun, kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti penebangan, pembakaran, dan pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam jumlah besar dalam jangka waktu lama, tidak memiliki efek yang sama.

Kerugian hutan didefinisikan sebagai penurunan luasan areal hutan akibat kerusakan ekosistem hutan, penggundulan dan alih fungsi lahan hutan, serta deforestasi. Hutan mangrove sering disebut sebagai "hutan bakau" atau "hutan pantai", menurut Hutchings dan Saenger (1987). Mereka tumbuh di pantai yang terlindung di wilayah tropis dan subtropis. Ghuffran (2012) menyatakan bahwa mangrove adalah formasi tumbuhan yang khas untuk pantai.

Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang unik dan rapuh yang mudah rusak karena campur tangan manusia. (kayu bakar, bahan bangunan dan konversi lahan menjadi kolam tempat penampungan untuk memenuhi kerentangan umum). Hutan mangrove juga merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak dicari oleh orang, dan wisata hutan mangrove memiliki keindahan alam yang dapat menarik pengunjung untuk menikmati keindahan alamnya. Oleh karena itu hutan mangrove merupakan salah satu kawasan cagar budaya perairan yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting, sehingga harus dilindungi dan di kelolah agar tidak terjadi kerusakan bahkan kepunahan.

Kawasan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Tinombo Selatan, Desa Sigenti Selatan. Yang dikelola dan di kembangkan menjadi tempat wisata tempat mangrove Vatu Lompa, bertempat di Desa Sigenti Selatan. Kecamatan Tinombo Selatan. Kawasan hutan mangrove Desa Sigenti Selatan ini menjadi tempat wisata yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat, menjadi tempat wisata yang di datangi para wisatawan untuk menikmati keindahan alam seperti pantai yang masih alami, pengunjung juga dapat menyaksikan hewan liar brung yang berterbanga bebas di hutan mangrove. Hal ini menjadi daya tarik wista yang ada di hutan mangrove vatu lompa, dikawasan wisata tersebut juga menyediakan tempat-tempat digunakan untuk tempat sekedar bersantai dan beristirahat dan banyak juga tempat tempat digunakan untuk berjualan. Namun sayangnya wisata hutan mangrove tersebut belum lagi dikelola dengan baik pemerintah setempat. Padahal wisata tersebut sudah banyak dikunjungi para wisata.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian digunakan agar peneliti mengetahui dan memahami kejadian yang terjadi ditempat yang diteliti, sehingga penelitian kualitatif digunakan untuk menfokuskan pada jawaban pertanyaan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian, mengumpulkan data dengan cara observasi langsung terjun kelapangan yang menjadi sasaran peneliti, peneliti akan melakukan pengamatan mengenai Sinegritas Pemerintah Desa dalam perlindungan hutan mangrove Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong.

2. Unit Analisis

Unit analisis data dalam penelitian ini diantaranya akan menganalisis berkaitan dengan Sinegrita Stakeholder Dalam Perlindungan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong

Gambar 1. 2 kawasann hutan mangrove



a. Objek Penelitian

Lebih spesifik menjadi objek penelitian disini adalah Sinegritas *Stakeholder* dalam Perlindungan Hutan Mangrove Di Desa Sigeni Selatan.

b. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini Desa Sigeni Selatan, Kecamatan Tinombo selatan, Kabupaten Parigi Mautong yang akan menjadi tujuan untuk mendapatkan informasi atau sebagai sumber dari penelitian ini yaitu:

Tabel 1. 2 Deskripsi Informan

No	Nama	Umur tahun	Pendidikan Terakhir	Jabatan/pekerjaan
----	------	---------------	------------------------	-------------------

1.	Arsyad	72	SLTA	Kepaladesa
2.	Dedy	42	SLTA	Sekretasis
3.	Ali	64	SLTP	Ketua mangrove
4.	Afdal	47	SD	Nelayan
5.	Fani	50	SLTP	Nelayan
6.	Jais	35	SMA	Anggota pengelola wisata hutan mangrove
7.	Juslan	45	SLTP	BPD
8.	Muslis	47	SLTP	Masyarakat dusun 2
9.	Munadi	50	SLTP	Kepala Dusun 3

Sumber : data lapangan

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan yang dipergunakan penelitian merupakan pengumpulan data melalui observasi dan interview.

a. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln (dalam lexi moleong, 2005:174) “observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data di lapangan, dengan cara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan yang sebenarnya”.

Observasi pada penelitian juga di gunakan untuk mengamati bagaimana pengelola kelompok wisata dan pemerintah desa bekerja sama dalam pengelolaan wisata hutan mangrove, Observasi dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak dari pemerintah desa dan pengelolaan kelompok melibatkan masyarakat desa sigenti selatan.

b. Interview

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka peneliti melakukan proses wawancara langsung dengan pihak terkait penelitian ini. Maka secara khusus selama dilapangan melakukan wawancara secara berkelompok maupun perindividu. Wawancara dengan kelompok masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh dan perspektif yang berbeda sebagai bentuk pertimbangan informasi yang diperoleh dengan informasi lainnya :

Pada penelitian ini, wawancara di gunakan untuk menggali informasi dari narasumber yang berkaitan dengan bagaimana proses melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan hutan mangrove, pengorganisasian kelompok pengelolaan kawasan hutan mangrove, perencanaan pengelolaan hutan mangrove serta pengawasan pengelolaan kawasan hutan mangrove di desa sigenti selatan kecamatan tinombo selatan kabupaten parigi mautong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat data yang ada di lapangan maupun ada dikantor berupa catatan, literatur,

arsip, laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di desa sigenti selatan kecamatan tinombo selatan kabupaten parigi mautong”.

Dokumen-dokumen resmi menjadi sumber data yang sangat penting dalam penelitian ini. Peneliti berhasil mengumpulkan berbagai dokumen, seperti struktur organisasi pemerintah desa, provil desa, struktur organisasi kelompok pengelola wisata.

Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan berbagai kegiatan yang berlangsung pertemuan rapat kelompok pengelola wisata, Foto-foto yang diambil selama proses penelitian menjadi bukti visual yang melengkapi hasil penelitian. Sumber informasi tambahan yang peneliti gunakan adalah publikasi dari media. Artikel berita, postingan media sosial.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, menurut Miles dan Haberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Pengumpulan Data.

Tahap ini melibatkan pengumpulan semua data yang relevan untuk penelitian atau analisis. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain bertujuan untuk mengetahui topik penelitian yang ingin di angkat.

b. Reduksi Data.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Teknik yang sering digunakan dalam tahap ini adalah pemilihan data yang relevan, dan pengelompokan data sehingga kesimpulan akhir dapat diambil melalui reduksi data.

c. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara visual atau deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif. Tujuan dari penyajian data adalah untuk membuat informasi yang terkandung dalam data menjadi lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses analisis.

d. Penarik kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan mencoba untuk menyimpulkan temuan atau pola yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan yang ditarik harus didukung oleh data yang telah dianalisis dengan seksama. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah ditarik untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh di lapangan.

BAB II
PROFIL DESA SIGENTI SELATAN, KEC. TINOMBO SELATAN, KAB.
PARIGI MAUTONG

A. Gambaran umum Desa Sigenti Selatan dan Sejarah Desa tahun 2024

Desa Sigenti Selatan merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pulau Sulawesi Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Desa Sigenti Selatan terdiri dari beberapa Desa yang berada di Kecamatan Tinombo Selatan yaitu sebanyak 20 (dua puluh) Desa.

1. Desa Tada Selatan
2. Desa Onconeraya
3. Desa Tada
4. Desa Silutung
5. Desa Timur timur
6. Desa Tada Utara
7. Desa Seney Polly
8. Desa Seney Tengah
9. Desa Seney Induk
10. Desa Katulistiwa
11. Desa Siaga
12. Desa Maninili
13. Desa Maninili Barat

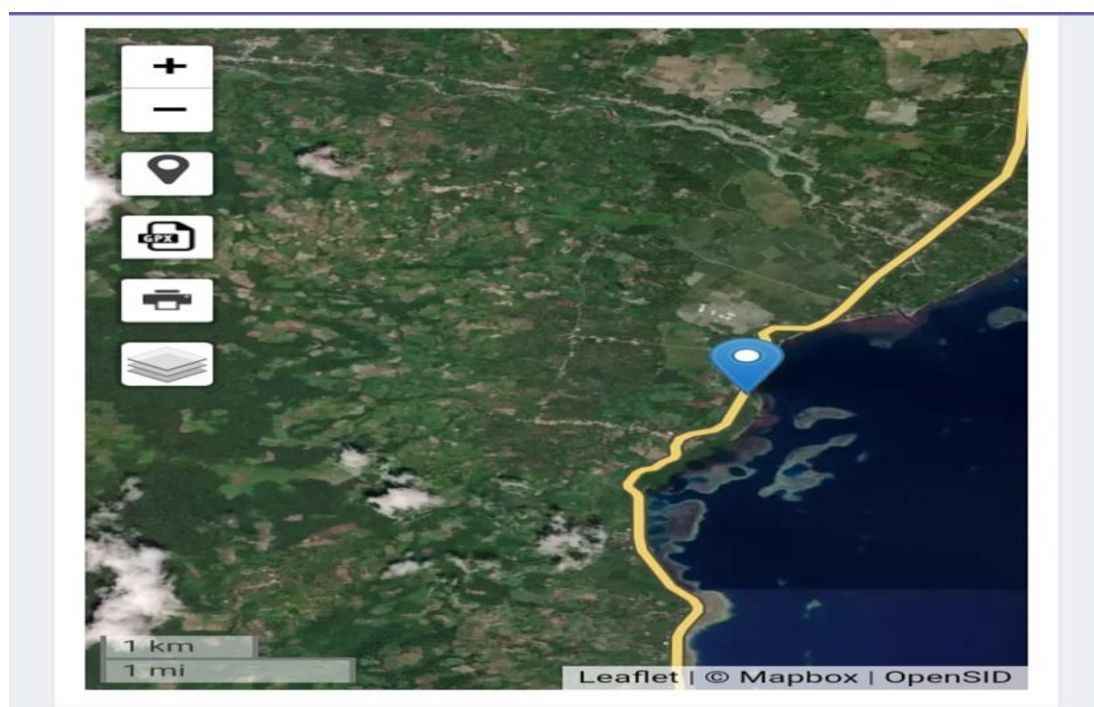
14. Desa Maninili Utara
15. Desa Sigenti Selatan
16. Dsa Sigenti Induk
17. Desa Sigenti Barat
18. Desa Sigega Bersih Hati
19. Desa Malanggo
20. Desa Malanggo Pesisir

Desa Sigenti Selatan sendiri dibentuk pada tahun 2007, dan nama Sigenti Selatan diambil dari bagian selatan dari Sigenti induk karena posisi geografi desa Sigenti Selatan terletak dibagian selatan. Dengan terbentuknya desa Sigenti Selatan mata pencarian penduduk desa Sigenti Selatan yaitu Petani, Pekebunan, Nelayan, Peternak Sapi. Awalnya desa Sigenti selatan gabungan dari desa Sigenti yang terletak di Kecamatan Tinombo Selatan, kabupaten Parigi Mautong. Provinsi Sulawesi Tengah, setelah terjadinya pemekaran dari desa Sigenti pada tahun 2007 Desa Sigenti Selatan memiliki 5 (lima) batas dusun, desa Sigenti Selatan.

Dari 5 (lima) dusun yang berada di Desa Sigenti Selatan, setiap penduduk wilayah dusun desa Sigenti Selatan, mata pencarian penduduk desa adalah Petani, Pekebun, Nelayan, Perternak Sapi sebagai pendapatan sehari-hari. Sementara itu berdirinya desa sigenti selatah pada tahun 2019 pemerintah (Kepala Desa) pertama desa Sigenti Selatan dipimpin oleh Pak Arsayad pada tahun 2009 selaku kepala pemerintahan/Kepala Desa Sigenti Selatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan tahun 2014. Dengan berakhirnya masa jabatan Pak Arsyad selaku kepala desa, dilanjutkan dengan hasil pemilihan kembali kepala desa, yang mana pemimpin yang terpilih kembali yaitu Pak Muaz Lakawana S,

Pdi. Pada tahun 2016 sampai dengan berakhirnya masa jabatan pemerintahan (Kepala Desa) pada tahun 2022. Dengan berakhirnya masa jabatan pak Muaz lakawana S. pdi. Sebagai kepala desa Sigenti Selatan, Dilanjutkan dengan pemimpin terpilih kembali Pak Arsyad pada tahun 2022 samapai saat ini. Untuk menjalankan roda kepemimpinan sebagai kepala pemerintahan (Kepala Desa)

Gambar 2.1 Peta Desa Sigenti Selatan



B. Keadaan Geografi

1. Letak dan Batas Wilayah Desa Sigenti Selatan

Desa Sigenti Selatan adalah salah satu desa yang terletak di Parigi Mautong yang berada di Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong. Desa Sigenti Selatan sendiri terletak di Kecamatan Tinombo Selatan,

Kabupaten Parigi Mautong, desa Sigentiselatan terletak di pingiran perairan bagian Teluk Tomini, penduduk desa Sigenti Selatan sendiri mayoritas mata pencaharian warga desa Sigenti Selatan sendiri adalah Petani, Nelayan, Perternak Sapi. Buruh Tani, Buruh Bangunan. Desa Sigenti Selatan sendiri memiliki luas wilayah Desa 2.194,54 Ha(hektar are) dan dibagi menjadi 5 (lima) dusun yaitu:

- a) Buol dusun 1 (satu)
- b) Bahari dusun 2 (dua)
- c) Palangka dusun 3 (tiga)
- d) Sarambu dusun 4 (empat)
- e) Tongkolili dusun 5 (lima)

Setiap penduduk dusun desa Sigenti selatan sendiri adalah Petani, Nelayan, Perternak Sapi, buruh tani, Buruh Bangunan, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Desa sigenti selatan menempuh jarak tempuh menuju ke tempat ibu kota Kabupaten Parigi Mautong dengan Jarak tempuh sejauh 125,00 Km (kilo meter). Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan mengendarai sepeda motor dalam 5 (lima) jam perjalanan menuju ke ibu kota kabupaten Parigi Mautong, sementara itu jarak tempuh ke ibu kota kecamatan Tinombo Selatan sejauh 7 Km (kilo meter), lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan Tinombo Selatan 0.30 Jam. Desa Sigenti Selatan sendiri Memiliki Batas wilayah bagian sebelah utara berbatasan dengan Wilayah Desa Sigenti. Wilayah batas bagian selatan desa Sigenti Selatan berbatasan dengan batas wilayah Desa Maninili Utara, wilayah bagian timur Desa Sigenti Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, wilayah

bagian barat desa Sigenti Selatan berbatasan Desa Pani'i yang berada di kecamatan Damsol.

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Sigenti Selatan

Batas	Desa/kelurahan	kecamatan
Sebelah Selatan	Desa Maninili utara	Tinombo selatan
Sebelah Utara	Desa Sigenti	Tinombo selatan
Sebelah Timur	Teluk tomini	
Sebelah Barat	Desa Panai'i	Damsol

Sumber : profil desa 2024

C. Keadaan Demografis

Berdasarkan pada data registrasi penduduk tahun 2024 di catat bahwa penduduk Desa Sigenti Selatan 1.674 jiwa dan 436 KK. Dapat diliat dari table rincinan peduduk dari usia sebagai berikut.

1. Data Penduduk menurut umur penduduk tahun 2024.

Berikut gambar tabel yang menunjukan data penduduk menurut usia atau umur.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah Orang
1	1 – 15	446
2	16 – 30	481
3	31 – 45	271
4	46 – 65	418
5	66 – 75	51
6	Usia diatas 75 tahun	7

	Jumlah	1.674
--	--------	-------

Sumber : profil desa 2024

Berdasarkan tabel gambar 2. 1 diatas bahwa jumlah terbanyak penduduk desa Sigenti Selatan dengan usia 0 sampai usia 15 tahun sebanyak 446 jiwa, penduduk yang berusia 16 tahun sampai 30 jumlah paling basar sebanyak 481 jiwa, penduduk yang berusia 31 samapai dengan usia 45 tahun sebanyak 271 jiwa, penduduk yang berusia 46 tahun sampai dengan usia 65 tahun sebanyak 481 jiwa, penduduk yang berusia 66 tahun sampai dengan usia 75 tahun sebanyak 51 jiwa, sedangkan penduduk yang usia di atas 75 tahun paling sedikit jumlah penduduk sebanya 7 jiwa,

2. Data penduduk menurut umur pendidikan

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk menurut pendidikan yang berada di Desa Sigenti Selatan

Tabel 2.3 Umur dan Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah jiwa
1	3 tahun – 6 tahun TK/play group	76
2	7 tahu – 18 tahun sedang sekolah	478
3	18 tahun – 56 tahun tidak perna sekolah	7
4	18 tahun – 56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	23
5	Tamat SD	437
6	Tamat SMP	176
7	Tamat SMA	122
8	Tamat D-1	2

9	Tamat D-2	2
10	Tamat D-3	3
11	Tamat S-1	25
12	Tamat S-3	0
	Jumlah	1.351 orang

Sumber : profil desa 2024

Dari tabel di atas jumlah penduduk desa Sigenti Selatan menurut pendidikan yang tertinggi adalah yang sedang bersekolah dari usia 7 (tujuh) tahun sampai usia 18 tahun, sementara jumlah penduduk yang tertinggi kedua yaitu tamatan SD (sekolah dasar) berjumlah 437 orang, jumlah penduduk yang tamatan SMP (sekolah Menengah pertama) berjumlah 176 orang, jumlah penduduk yang tamatan SMA (sekolah menengah atas) berjumlah 122 orang, jumlah penduduk anak yang bersekolah di TK/Play grub berjumlah 76 orang sementara jumlah penduduk yang S- 1 berjumlah 25 orang, sementara jumlah penduduk yang tamatan D-1 berjumlah 2 orang, tamatan D-2 berjumlah 2 orang, dan D-3 berjumlah 3 orang .

3. Data penduduk menurut Mata Pencarian Penduduk

Berikut gambar tabel yang menunjukkan jumlah penduduk menurut mata pencarian penduduk desa Sigenti selatan

Tabel 2.4 Mata Pencarian Penduduk

No	Mata pecarian penduduk	Jumlah jiwa
1	Petanani	427
2	Pegawai Negri Sipil	6

3	Nelayan	37
4	Montir	2
5	Perawat swasta dan bidan swasta	4
6	Polri dan guru swasta	4
7	Tukang batu	7
8	Karyawan Perusahaan Swasta dan Wiraswasta	23
13	Perangkat Desa	5
14	Buruh harian lepas	10
15	Karyawan Honorer	6
Total		531

Sumber : profil desa 2024

Dari tabel diatas bawah jumlah penduduk menurut data mata pencarian pokok masyarakat desa sigenti selatan, mayoritas petani,

4. Data penduduk Agama/Aliran Kepercayaan

Berikut tabel penduduk desa Sigenti selatan menurut Agama atau Aliran kepercayaan menurut data desa

Tabel 2.5 Data Penduduk Sesuai Agama

Agama	Laki-Laki	perempuan
Islam	882	792
Kristen	0	0
Jumlah	1.674 Jiwa	

Sumber : profil desa 2024

Berikut penduduk desa Sigenti selatan menurut agama atau aliran kepercayaan, bawah desa Sigenti Selatan mayoritas penduduk desa Sigenti Selatan adalah Beragama Islam. Dengan total jumlah 1.724 jiwa.

5. Etnis atau suku

Tabel 2.6 jumlah etnis atau suku Desa Sigenti Selatan

Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Bugis, bugis paga	151	139
Kaili	434	279
jawa	32	34
Bungku	20	17
Gorontalo	61	53
Lauje	183	146
Tajio	79	46
Jumlah	1.674 jiwa	

Sumber : profil desa 2024

Tabel penduduk menurut etnis atau suku yang terbanyak yaitu suku Kaili jumlah 713, terbanyak kedua yaitu suku lauje 41, yang ketiga yaitu suku bugis dan bugis paga 290, ke empat suku tajio 125, kelima suku gorontalo 114. Keenam suku jawa 66, yang terakhir suku bungku 37, dilihat dari gambar tabel di atas bahwa penduduk desa sigenti selatan beraneka ragam suku penduduk desa. Dengan total jumlah penduduk menurut etnis total berjumlah 1.674 jiwa.

6. Prasarana Ibadah Desa Sigenti Selatan

Tabel 2.7 prasarana tempat beribadah di desa sigenti selatan

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	6
2	Mushola	4
3	Gereja	0
Total		10

Sumber :profil desa 2024

Dapat dilihat dari tabel diatas Desa Sigenti Selatan memiliki bangun tempat beribadah yang cukup memadai bagi masyarakat desa Sigenti Selatan dengan jumlah bangun masjid yang terbanyak yaitu 6 jumlah bangun dengan tempat bangunan mushola berjumlah 4, total bangun tempat beribadah yaitu 10 bangunan tempat beribadah.

7. Prasarana kesehatan Desa Sigenti Selatan

Tabel 2.7 jumlah prasarana kesehatan untuk warga desa sigenti selatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Ruma Sakit	0
2	Polindes	1
3	Posyandu	6
Total		7

Sumber : profil desa 2024

Berdasarkan tabel di atas tempat bangun prasarana kesehatan yang berada di desa Sigenti Selatan memiliki bangun dengan jumlah terbanyak posyandu yaitu 6 jumlah

bangunan, dan memiliki prasarana bangunan polindes yang berada didesa Sigenti Selatan dengan jumlah bangun polides 1 bangunan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat desa sigenti selatan.

8. Prasarana Umum Desa Sigenti Selatan

Tabel 2.8 prasanana umum untuk fasilitar wagana.

No	Prasarana Umum	Jumlah
1	Lapangan Olaraga	7
2	Balai Pertemuan	1
3	Bak Penampungan Air	10
4	Kamar Mandi Dan WC Umum	6
5	Rumah Adat	1
6	Rumah Nelayan	50
Total		75

Sumber : profil desa 2024

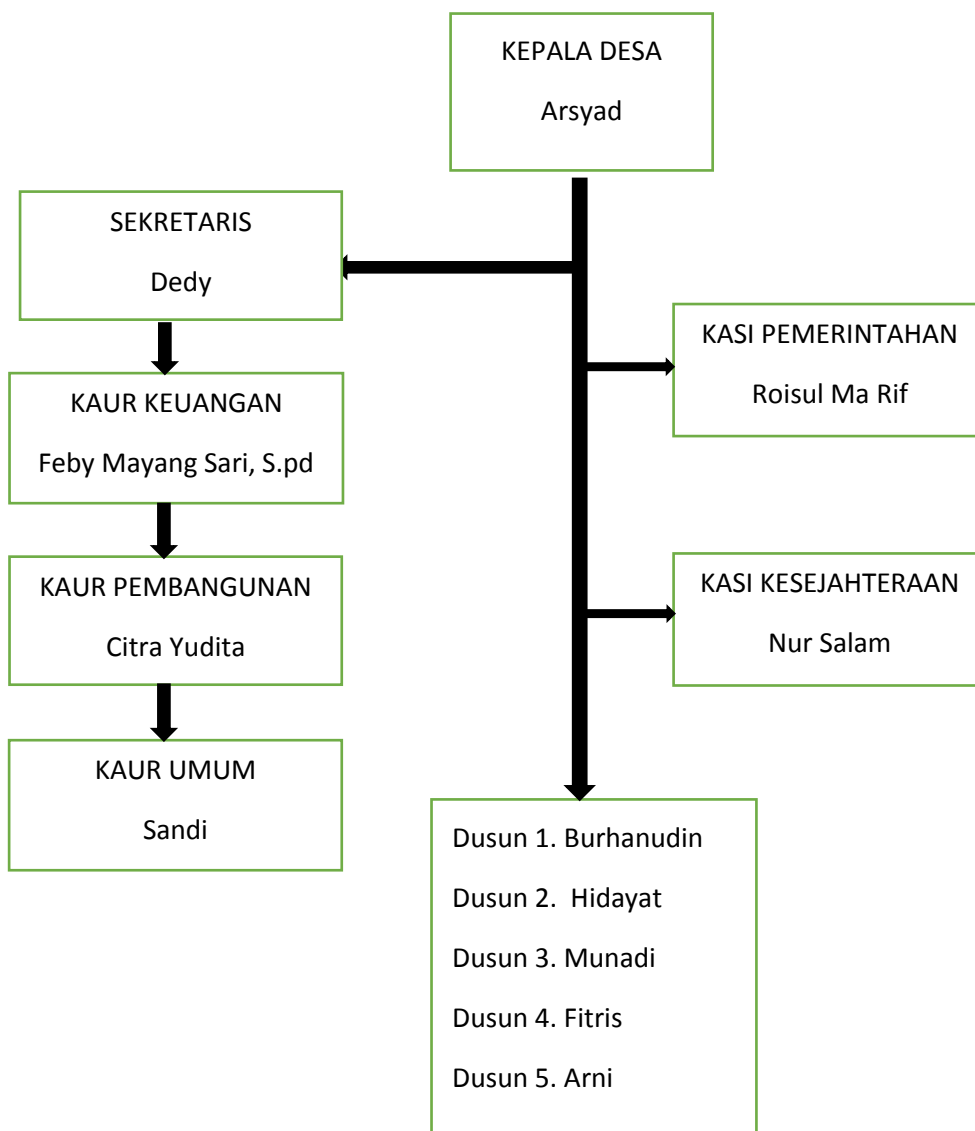
Berdasarkan tabel gambar di atas prasaran bangunan umum yang berada didesa sigenti selatan cukup memadai, bedardasarkan tabel diatas jumlah terbanyak prasarana umum Rumah Nelayan jumlah 50 bangunan, untuk ditempati warga Desa Sigenti Selatan, terbanyak kedua yaitu jumlah bangunan 10 Bak Penampungan Air, untuk fasilitas masyarakat. Terbanyak ketiga yaitu bangun fasilitas kamar mandi dan Wc umum dengan jumlah 6 bangunan. Adapun banguan lainnya fasilitas masyarat Desa Sigenti Selatan yaitu bangunan Balai Pertemuan 1, bangunan Rumah adat 1, dengan total jumlah

bangunan yang berada didesa sigenti fasilitas umum yaitu totalnya 75, fasilitas desa.

D. Pemerintah Desa Sigenti Selatan

1. Struktur organisasi Pemerintah Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong.

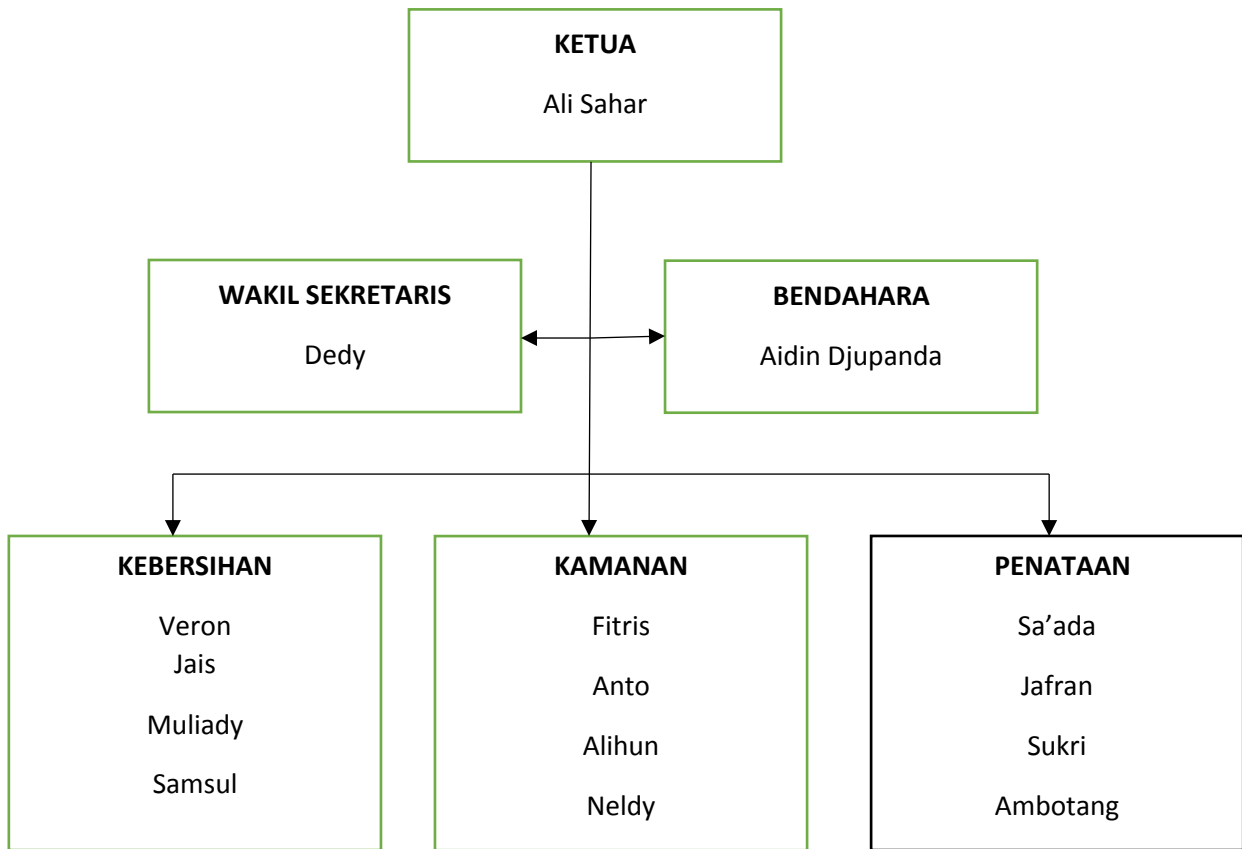
Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Desa Sigenti Selatan



E. Deskripsi Wisata Hutan Mangrove

Hutan mangrove desa sigenti selatan adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Sigenti Selatan yang mana dikelola salah satu kelompok pengelola wisata, hutan mangrove desa sigenti selatan sendiri memiliki luas 4, 5 Ha. kawasan hutan yang cukup lebat, yang terletak dipesisir pantai desa sigenti selatan yang mana letak hutan mangrove berada di dusun 1 dan dusun 3 di pesisir pantai. Dan berbatasan dengan desa Maninili Utara dan teluk tomini, Pengelolaan hutan mangrove sebagai tempat wisata ini dikelola oleh kempok masyarakat mulai pada tahun 2018 dengan mengembangkan sebagai tempat objek wisata hutan mangrove, adapun daya tarik pengunjung untuk mengunjungi kawasan hutan mangrove ini dikarenakan hutan mangrovenya masih cukup lebat, serta budidaya kepiting, budidaya ikan dan pemandangan pesisir pantai yang cukup indah, serta pengunjung diberikan rasa kenyamanan saat berkunjung ke tempat wisata hutan mangrove desa sigenti selatan.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Kelompok Pengelola Hutan Mangrove



Pendapatan hasil dari pengelolaan kawasan hutan mangrove sebagai tempat wisata yang berada didesa sigenti selatan yang di kelola oleh kelompok wisata mengeluarkan dana pribadi dari kelompok pengelola wisata untuk awal pembangun tempat objek wisata kawasan hutan mangrove, tanpata bantuan anggaran dari pemerintah desa untuk meberikan bantuan pembangunan tempat wisata hutan mangrove desa sigenti selatan. Adapun pendapatan lainnya untuk pembangunan kawasan hutan mangrove ini pengelola wisata melakukan koordinasi dengan dinas kehutan dan pariwisata untuk mendapatkan dana pembangunan kawasan wisata hutan mangrove.

Pengunjung wisata hutan mangrove ini yaitu hanya dari kalangan wisatawan lokal untuk menikmati keindahan kawasan hutan mangrove yang berada dipesisir pantai, adapun jumlah pengunjung wisatawan lokal perahun mencapai 1.457 orang pengunjung, fasilitas obyek wisata hutan mangrove ada beberapa bangunan untuk kenyamanan pengunjung wisata yang bisa digunakan oleh pengunjung wisata hutan mangrove yang berada disamping selatan, adapun fasilitas yang disediakan pengelola kawasan hutan mangrove sebagai berikut:

Tabel 2.9 Fasilitas Wisata Hutan Mangrove

No	Fasilitas Bangunan	Jumlah
1.	Gazebo	5
2.	Wc/Kamar Mandi	2
3.	Perahu	3
4.	musolah	1
Total		12

Sumber data struktur mangrove

BAB III

SINEGRITAS *STAKEHOLDER* DALAM PENGELOLAAN HUTAN

MANGROVE DI DESA SIGENTI SELATAN, KECAMATAN TINOMBO

SELATAN, KABUPATEN PARIGI MAUTONG

Pada bab ini peneliti akan memaparkan, menjelaskan hasil temuan selama ini di tempat penelitian desa sigenti selatan, berupa hasil data informan yang telah di wawancarai terkait judul “**Sinegritas Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautong**”. Selanjutnya data informan akan di olah menjadi data sekunder. Pada dasarnya analisis data hasil penelitian adalah sebagian jawaban atas pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian di kumpulkan dari jawaban informan kemudian menjadi landasan analisis peneliti, karena sebuah jawaban dari informan berkaitan dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti itu sendiri, pertanyaan peneliti kepada informan merupakan dari keseluruhan fakta-fakta yang berada di lapangan, dengan menggunakan pengamatan langsung maupun wawancara, dan dokumentasi. Sebelum memulai sebuah pertanyaan kepada informan tentunya peneliti melakukan pendekatan secara persuasif terhadap informan, agar sebuah data yang di peroleh benar-benar valid dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan hutan mangrove merupakan upaya untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di desa sigenti selatan sebagai destinasi pariwisata hutan mangrove dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sigenti selatan maupun masyarakat sekitarnya. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang terletak di tepi pantai dipengaruhi pasang surut air laut sehingga selalu tergenang air. Manfaat dari

ekosistem mangrove yaitu sebagai mitasi bencana dan menjadi wisata alam dan atraksi ekowisata, ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan, karena menjadi tempat berkembang biak

Pengelolaan hutan mangrove menurut (Tambunan, Harahap dan Lubis 2005). Kerusakan hutan mangrove dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun faktor alam. Untuk mengetahui rusaknya hutan mangrove yang disebabkan oleh faktor manusia yaitu adanya penebangan hutan mangrove dilakukan dengan penebangan liar atau illegal logging dan juga secara besar-besaran untuk dapat membuat bahan bangunan ataupun arang dan kayu maupun kepemilikan lahan oleh masyarakat sekitar. Adapun konservasi yang mempunyai arti tentang hal mengupayakan kita menjaga hutan dan juga melindungi hutan dengan baik maupun dengan bijaksana. Jika dilihat pelestarian dan perlindungan dari sudut pandang ekonomi yaitu dengan mengalokasikan sumber daya alamnya untuk masa sekarang, tetapi jika dilihat dari sudut pandang ekologi yaitu dengan mengalokasikan sumber daya alamnya untuk masa yang akan datang. Dapat kita ketahui bahwa konservasi hutan mangrove merupakan usaha untuk melindungi maupun melestarikan alam dengan bentuk menjadikan area tersebut menjadi kawasan wisata hutan mangrove baik itu dalam perairan laut maupun pesisir hutan mangrove.

A. Sinegritas Stakeholder Dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigeni Selatan

Dalam tahap pengelolaan perencanaan pengembangan hutan mangrove desa sigeni selatan merupakan kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber daya yang dimiliki, perencanaan dalam pengelolaan hutan mangrove menetapkan

secara garis besar apa yang perlu dilakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana pengelolaan wisata hutan mangrove menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan Richard L. Daft merupakan suatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi berbagai tujuan kerja organisasi, memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya dimasa mendatang. Sedangkan menurut Robbins perencanaan suatu proses melibatkan penentu sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneli, dalam Perencanaan Pengembangan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan yang disampaikan Arsyad (Kepala Desa) Desa Sigenti Selatan dalam wawancara :

“...Disini saya selaku penanggung jawab terhadap pemerintahan desa sigenti selatan bersedia memberikan anggaran dana desa pada tahun 2025 akan data untuk progam perencanaan pengelolaan wisata hutan mangrove serta akan memberikan fasilitas tempat untuk mengadakan pertemuan atau rapat kepada kelompok pengelola wisata hutan mangrove.” (28 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Arsyad selaku Kepala Desa Sigenti Selatan dalam proses pernacanaan yang akan dilakukan pemerintah Desa siap memberikan anggaran dana desa serta memfasilitasi tempat untuk pertemuan kepada kelompok pengelolaan wisata hutan mangrove.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ali Sahar (ketua kelompok Pengelola wisata :

“Perencanaan pengelolaan huntan mangrove tahun ini kami akan berkerja sama dengan pemerintah desa dalam menetapkan program yang dikerjakan

dalam perencanaan pengelolaan hutan mangrove sebagai tempat wisata, karna tahun pemerintahan sebelumnya kami sudah pernah merasakan tanpa kerja sama dengan pemerintah desa, sangat sulit kami mendapat dukungan anggaran untuk perencanaan tahap pengelolaan yang kami akan kerjakan. Karna perencanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove ini sebagai tempat wisata cukuplah besar anggarannya untuk pengelolaan kawasan hutan mangrove...”

(02 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ali Sahar (ketua kelompok pengelola wisata) dalam perencanaan kami melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk dapat mempermudah kami dalam mendapatkan dana untuk perencanaan pengelolaan wisata hutan mangrove.

Selanjut penelitian melakukan wawancara bersama Dedy (sekretaris desa dan sekretaris pengelolaan kelompok wisata) :

Pemerintah desa yang terpilih sekarang akan bekerja sama dalam perencanaan pengelolaan hutan mangrove sebagai tempat wisata, dilihat dari kejadian pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove sebelumnya sebelum pemerintahan yang sekarang, pengelolaan kawasan hutan mangrove ini tanpa kolaborasi dengan pihak pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan hutan mangrove, kelompok pengelola wisata ini minimnya pendapatan anggaran untuk perbaikan fasilitas yang ada. (28 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dedy selaku sekretaris desa dan sekretaris pengelola kelompok wisata mempertegas pentingnya kolaborasi bersama pihak pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan hutan mangrove, agar tidak terjadi seperti pengelolaan tahun sebelumnya yang terkendala dengan dana.

Dari pernyataan ketiga informan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan hutan mangrove yang ada di Desa Sigenti Selatan melakukan sinergitas dengan pemerintah desa dalam mendukung proses perencanaan program wisata hutan mangrove serta dukungan yang diberikan berupa dana pengelolaan dan fasilitas

tempat untuk pertemuan rapat kelompok pengelola wisata. Tentunya hal ini selaras dengan teori Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal tentang sinegritas yaitu kombinasi atau kerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih besar dibandingkan dengan dikerjakan sendiri. Dalam hal ini sinegritas yang dilakukan dalam rangka membuat suatu program perencanaan kedepan agar yang dilakukan lebih produktif dan masif.

Dalam perencanaan pengelolaan hutan mangrove bukan hanya pihak pemerintah desa dan pengelola wisata yang dilibatkan tetapi masyarakat lokal juga merupakan pihak yang penting untuk dilibatkan dalam proses perencanaan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran, tenaga dan dana agar pengelolaan wisata hutan mangrove dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah desa, pihak pengelola wisata dan masyarakat lokal.

Akan tetapi dalam perencanaan wisata hutan mangrove Desa Sigenti Selatan pihak Pemerintah Desa hanya melibatkan pengelola wisata tidak melibatkan masyarakat lokal dalam bagian perencanaan pengelolaan wisata hutan mangrove Desa Sigenti Selatan. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Afdal (warga) Desa Sigenti dalam wawancara dia menjelaskan :

“Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan mangrove sebagai tempat wisata kami warga penduduk sekitar kawasan mangrove tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan hutan mangrove, sementara saya selaku warga yang berada dekat dengan kawasan hutan mangrove, sering menanam bibit hutan mangrove untuk menjaga kerusakan hutan mangrove sebelum dijadikan tempat wisata kawasan hutan mangrove...” (10 september 2024)

Sejalan dengan yang telah disampaikan Fani (Nelayan) Desa Sigenti Selatan dalam hasil wawancara dia menjelaskan:

“...Proses tahap perencanaan pengembangan kawasan wisata hutan mangrove ini kami sebagai nelayan yang tinggal di pesisir pantai tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pengembangan wisata ini, melihat dari kelompok mereka pengelola wisata kawasan hutan mangrove ini, hanya melibatkan warga yang masih mempunyai ikan keluarga dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove.”
(10 september 2024)

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua informan diatas dapat ditarik

kesimpulan bahwasannya mereka selaku masyarakat lokal yang berada dikawasan wisata hutan mangrove Desa Sigenti Selatan tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan wisata, mereka hanya melibatkan masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pihak pengelola wisata. Padahal masyarakat lokal merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan wisata yang desa, karena masyarakat lokal ikut terlibat dalam melestarikan kawasan hutan mangrove dengan cara menanam bibit hutan.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama informan diatas tentang sinegritas stakeholder perencanaan wisata hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan, Pemerintah Desa hanya melibatkan kelompok pengelola wisata hutan mangrove sebagai mitra dalam perencanaan wisata hutan mangrove, tetapi masyarakat lokal tidak ikut terlibat dalam proses perencanaannya. Artinya tidak ada sinegritas yang dibangun dengan baik oleh pemerintah desa karena melupakan unsur masyarakat lokal dalam mengelola wisata hutan mangrove. Namun, penting sekali untuk melibatkan masyarakat lokal secara lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan wisata ini. Karena partisipasi masyarakat lokal akan mengoptimalkan keberlanjutan program pengelolaan wisata hutan mangrove dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi desa serta masyarakat itu sendiri.

B. Sinegritas Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan.

Dalam tahap pelaksanaana pengembangan hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan, tindakan yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun oprasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dalam pelaksanaan yang disampaikan oleh Arsyad (Kepala Desa) Sigenti Selatan dalam wawancara dia menjelaskan :

“...Tahap pelaksanaan pengembangan kawasan hutan mangrove ini kami dari pemerintahan desa menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pengembangan kawasan wisata hutan mangrove kepada kelompok pengelola kawasan witasa hutan mangrove yang di pimpin oleh ketua kelompoknya bapak ali sebagai pelaksana kegitaan pengelolaan pengembangan kawasan hutan mangrove.” (28 agustus 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas Arsyad (Kepala Desa) Sigenti Selatan Dari wawancara ini, bahwa pemerintah desa memberikan kepercayaan penuh kepada kelompok pengelola untuk mengelola dan mengembangkan kawasan wisata hutan mangrove. Tentu hal ini memberikan kebebasan kepada kelompok pengelola dalam menentukan program yang akan dilaksanakan dalam kawasan wisata hutan mangrove,

tetapi pemerintah desa tetap berperan penting sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan yang diperlukan, serta melakukan pengawasan dan koordinasi yang efektif dalam proses pelaksanaan program yang akan dijalankan oleh kelompok pengelolaan Kawasan hutan mangrove.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ali Sahar (ketua kelompok Pengelola wisata) :

“Pelaksanaan pengembangan wisata ini kami melakukan kerja bakti bersama anggota kelompok untuk tahap pelaksanaan pengembangan kawasan hutan mangrove ada pun tahap pelaksanaan ini kami dari kelompok pengelola wisata membuat jadwal dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove, jadwal yang kami agendakan itu yaitu 1 satu minggu 2 kali melakukan kerja bakti kelompok untuk baik menjaga kebersihan kawasan hutan mangrove...” (02 september 2024)

Menurut pernyataan dari Ali Sahar menunjukan bahwa kelompok pengelola kawasan wisata hutan mangrove menunjukkan tanggung jawab yang dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata hutan mangrove dengan melibatkan anggota kelompok dalam kegiatan kerja bakti yang dijadwalkan dua kali seminggu. Karena kegiatan kerja bakti ini menjadi aspek penting dalam menjaga kawasan agar tetap bersih dan terawat, sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pengunjung yang lagi berwisata di kawasan hutan mangrove. Selain itu, kegiatan ini dapat memperkuat koordinasi di dalam kelompok dan mempererat hubungan antar anggota, yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan.

Selain itu peneliti melakukan wawancara bersama dengan Jais (Anggota pengelola wisata) :

“...untuk menunjang kesuksesan dari wisata hutan mangrove kami melakukan penanaman kembali bibit mangrove di tempat wisata, membangun gazebo tempat istirahat bagi para pengunjung wisata mangrove serta membangun Musolah dan kamar mandi untuk di gunakan pengunjung agar berwisata bisa dengan nyaman dan tentunya kami memperhatikan kebersihan...” (20 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Jais selaku anggota kelompok pengelola wisata yaitu untuk melestarikan kembali lingkungan dilakukan penanaman bibit mangrove dikawasan wisata. Selain itu untuk upaya menjaga kenyamanan para pengunjung membangun gazebo untuk tempat istirahat serta membuatkan musolah sebagai tempat ibadah dan kamar mandi untuk kebutuhan pengunjung dengan memprioritaskan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Juslan (BPD) :

“...Dalam proses pelaksanaan ini kendala yang di hadapi pengelola wisata hutan mangrove yaitu biaya untuk pengelolaan karna melihat biaya untuk perencanaan cukup besar dalam pengelolaan ...” (20 Januari 2025)

Menurut pernyataan dari hasil peneliti bersama Juslan (BPD) adalah kendala yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove. Dengan adanya kendala ini perlu melakukan strategi yang tepat untuk mencari pendanaan alternatif dalam mengoptimalkan wisata hutan mangrove bisa dengan cara melakukan kerja sama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan pernyataan yang didapat oleh peneliti, kesimpulan hasil wawancara mengenai sinegritas stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan hutan mangrove Desa Sigenti Selatan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan kawasan wisata hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan telah dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara pemerintah Desa dan kelompok pengelola wisata kawasan hutan mangrove. Dalam hal pelaksanaan Pemerintah desa memberikan kepercayaan penuh

kepada kelompok pengelola wisata untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan kawasan wisata, akan tetapi pemerintah desa tetap berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan, melakukan pengawasan, dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik.

Kelompok pengelola wisata, yang dipimpin oleh Ali Sahar, menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata hutan mangrove. Mereka secara rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti dua kali seminggu dengan melibatkan seluruh anggota kelompok. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan kawasan wisata, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara anggota kelompok.

Selain proses kegiatan kerja bakti kelompok pengelolaan wisata membangun gazebo sebagai tempat istirahat para pengunjung serta membangun mushola sebagai tempat ibadah dan membuat kamar mandi yang dapat digunakan oleh pengunjung wisata. Dalam proses berjalannya pelaksanaan yang dilakukan oleh kelompok pengelola hutan mangrove mengalami kendala dengan biaya yang cukup besar.

C. Sinegritas Stakeholder Dalam Pengorganisasian Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan

Organisasi kelompok yang berada di desa sigenti selatan, merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompok dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan, orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Organisa suatu peroses dan rangkaiian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk di selesaikan anggotaa kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sinegritas stakeholder dalam pengorganisasian pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan, peneliti telah melakukan wawancara bersama dengan Arsyad (Kepala Desa) yang menyatakan bahwa:

“Pengorganisasian kelompok pengelola wisata hutan mangrove ini yang lokasinya berada di dusun 2 dan dusun 3. Dalam proses pembentukan kelompok organisasi ini mereka melibat beberapa masyarakat untuk bergabung bersama dalam pengembangan kawasan hutan mangrove untuk di jadikan tempat wisata...” (28 agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Arsyad (Kepala Desa) bahwa dalam proses pengorganisasian kelompok pengelola wisata hutan mangrove mereka melibatkan beberapa masyarakat dari dua dusun yaitu dusun 2 dan 3, proses ini menciptakan rasa kepemilikan, tanggung jawab bersama, dan peluang ekonomi maupun sosial. Namun, keberhasilan program ini juga memerlukan dukungan berkelanjutan, pelatihan, dan pengawasan dari pihak pemerintah desa maupun pihak terkait lainnya untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ali Sahar (ketua kelompok Pengelola wisata) :

“Untuk pengorganisasian kelompok pengelola wisata hutan mangrove sudah memiliki struktur organisasi pengelola hutan mangrove untuk dijadikan tempat wisata sudah memiliki organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendarahara, sub bidang anggota kebersihan, keamanan, penataan. Masing-masing yang berada di organisasi ini mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan hutan mangrove. (02 september 2024)...”

Menurut pernyataan Ali Sahar bahwa sudah dibentuk struktur organisasi formal hal ini merupakan upaya untuk menciptakan pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove yang kompeten dan terorganisir. Pembagian tanggung jawab yang jelas memberikan kerangka kerja untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan. Namun, keberhasilan struktur ini sangat bergantung pada kemampuan anggota organisasi untuk bekerja secara sinergis, serta dukungan pemerintah desa dengan memberikan pelatihan kepada anggota pengelola kawasan wisata hutan mangrove untuk meningkatkan kapasitas pengelola dalam menjalankan perannya.

Kemudian peneliti turut mewawancarai Munafi (Kepala Dusun 3) :

“...Dalam pengorganisasian pengelola kelompok wisata hutan mangrove ini saya melihat pengelola wisata itu melibatkan masyarakat di desa Sigenti selatan ini dilibatkan dalam menarik pengunjung dengan berjualan di tempat wisata hutan mangrove...” (20 Januari 2025)

Pernyataan informan menjelaskan mengenai bagaimana proses pengorganisasian yang melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi seperti berjualan di kawasan wisata. Hal ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Selanjut wawancara bersama Muhlis (Masyarakat dusun 2) :

“...Pengorganisasian masyarakat di desa Sigenti selatan dilibatkan dalam organisasi pengelola kelompok yang di setiap dusun itu ada warga yang dilibatkan dalam pengelolaan wisata mangrove...” (20 Januari 2025)

Dari pernyataan informan di atas Pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan wisata mangrove di Desa Sigenti Selatan mencerminkan pendekatan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan dengan melibatkan

masyarakat dalam kelompok pengelola agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan wisata hutan mangrove.

Berdasarkan pernyataan dari informan dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam proses pengorganisasian kelompok pengelola wisata hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan telah menciptakan tata kelola yang baik dengan melibatkan beberapa masyarakat yang ada di 2 dusun yaitu dusun 2 dan 3 untuk ambil bagian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kawasan wisata hutan mangrove serta dengan melakukan pengorganisasian pembentukan anggota kelompok wisata dengan peran dan fungsinya masing-masing. Selain melibatkan masyarakat tergabung dalam struktur pengelola wisata juga melibatkan masyarakat untuk berjualan agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di kawasan wisata hutan mangrove.

Namun, keberhasilan jangka panjang memerlukan dukungan yang konsisten, pelatihan berkelanjutan, dan sinergi antar anggota kelompok serta pihak terkait untuk mewujudkan tujuan pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

D. Sinergitas Stakeholder Dalam Pengawasan Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Sigenti Selatan.

Pengawasan dalam pengembangan hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan melibatkan sinergitas antara berbagai stakeholder untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang telah direncanakan. Pemerintah desa, sebagai fasilitator utama, memegang peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan

pengelolaan oleh kelompok pengelola wisata. Proses pengawasan ini mencakup pemantauan rutin terhadap kegiatan yang dilakukan kelompok, seperti kebersihan, keamanan, dan penataan kawasan hutan mangrove, untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan awal tentunya dalam proses pengawasan harus melibatkan stakeholder lain seperti masyarakat setempat, lembaga lingkungan, dan pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan kawasan turut memberikan dukungan berupa masukan dan evaluasi.

Sinergitas antara para pihak ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sehingga potensi kawasan hutan mangrove sebagai destinasi wisata dan kawasan konservasi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan. Dukungan berupa pelatihan, evaluasi berkala, serta koordinasi antar stakeholder juga menjadi elemen kunci dalam pengawasan untuk meningkatkan kapasitas pengelola dan memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan hutan mangrove.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sinergitas stakeholder dalam pengorganisasian pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan, peneliti telah melakukan wawancara bersama dengan Arsyad (Kepala Desa) yang menyatakan bahwa:

“Dalam pengawasan pengelolaan wisata hutan mangrove ini, di tahun anggaran 2025 akan datang. Kami dari pemerintah akan mengawasi kegiatan pengelolaan kawasan hutan mangrove ini, serta akan meminta pertanggung jawaban setiap tahun untuk membuat laporan kepada kami pemerintah desa. Agar kami mengetahui kinerja kelompok wisata hutan mangrove....” (28 Agustus 2024)

Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa melalui permintaan laporan pertanggung jawaban kepada kelompok pengelola kawasan wisata hutan mangrove menunjukkan bahwa pemerintah desa menunjukkan adanya komitmen dalam melakukan

pengawasan dan mendukung dalam proses pengelolaan. Hal ini dilakukan agar ada transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi untuk keberlanjutan program.

Kemudian peneliti turut melakukan wawancara bersama Ali Sahar (ketua kelompok Pengelola wisata) yang menyatakan :

“Sistem pengawasan pengelolaan hutan mangrove ini, dari kebersihan, keamanan, perlindungan hutan mangrove, kami dari pengelola kelompok ini membagi tugas anggota kelompok, di bidang kebersihan, di bidang keamanan, serta perlindungan pohon mangrove membuat papan pemberitahuan tentang dilarang menebang hutan mangrove. Kalau di bagian pendapatan(uang) pengelolaan hutan mangrove ini kelompok kami melakukan pertemuan kelompok setiap satu bulan sekali untuk membahas pendapatan. Agar anggota kelompok pengelola wisata ini lebih tersparan terhadap pendapatan wisata hutan mangrove ini. Untuk proses pengawasan yang akan datang kelompok pengelola hutan mangrove ini tahun 2025 akan bekerja sama dengan pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan kawasan hutan mangrove....” (02 September 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa kelompok pengelola wisata hutan mangrove telah menerapkan sistem pengawasan yang mencakup pembagian tugas yang jelas, perlindungan lingkungan, dan transparansi keuangan serta melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk memperkuat pengelolaan kawasan wisata. Dengan ini, kelompok pengelola dapat menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai aset penting bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama informan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dalam pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan dilakukan dengan cara sinergitas antara pemerintah desa dan kelompok pengelola wisata. Pemerintah desa dalam hal ini berperan sebagai fasilitator utama dengan memberikan dukungan secara teknis serta melakukan pengawasan berkelanjutan dengan meminta laporan pertanggungjawaban tahunan dari kelompok pengelola dengan tujuan

untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang mendukung keberlanjutan program.

Selain itu kelompok pengelola wisata telah menerapkan sistem pengawasan yang dilakukan di internal dengan pembagian tugas yang jelas di bidang kebersihan, keamanan, dan perlindungan lingkungan serta melakukan pemasangan papan larangan menebang hutan mangrove dan melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas pendapatan bertujuan untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan.

Sinergitas antara berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta memastikan kelestarian ekosistem mangrove sebagai aset ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.

Tabel Perencanaan Pelaksanaan Pengorganisasian dan Pengawasa

Pengelolaan	Pemerintah desa	kelompok	masyarakat
Perencanaan	Pemerintah Desa hanya melibatkan kelompok pengelola wisata hutan mangrove sebagai mitra dalam pengembangan hutan mangrove, tetapi masyarakat lokal tidak	Ali Sahar (ketua kelompok pengelola wisata) dalam perencanaan kami melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk dapat mempermudah kami dalam mendapatkan	masyarakat lokal yang berada dikawasan wisata hutan mangrove Desa Sigeni Selatan tidak dilibatkan dalam proses perencananaan

	ikut terlibat dalam proses perencanaannya.	dana untuk perencanaan pengelolaan wisata hutan mangrove.	pengelolaan wisata, mereka hanya melibatkan masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan pihak pengelola wisata
Pelaksanaan	Pemerintah desa memberikan kepercayaan penuh kepada kelompok pengelola untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan kawasan wisata hutan mangrove, namun pemerintah desa tetap berperan sebagai fasilitator yang menyediakan	Kelompok pengelola wisata menunjukkan tanggung jawab tinggi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan. Mereka secara rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti dua kali seminggu, yang tidak hanya menjaga kebersihan kawasan tetapi juga mempererat hubungan	Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove sejauh ini belum dilibatkan secara langsung, karna dalam pelaksanaan yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove hanya pemerinta dan kelompok pengelola wisata.

	dukungan serta melakukan pengawasan dan koordinasi.	antar anggota kelompok.	
pengorganisasian	Arsyad (Kepala Desa) bahwa dalam proses pengorganisasian kelompok pengelola wisata hutan mangrove mereka melibatkan beberapa masyarakat dari dua dusun yaitu dusun 2 dan 3, proses ini menciptakan rasa kepemilikan, tanggung jawab bersama, dan peluang ekonomi maupun sosial.	kelompok pengelola wisata hutan mangrove di Desa Sigeni Selatan dalam proses pengelolaan kawasan wisata ini telah membuat struktur organisasi yang jelas dengan melibatkan beberapa masyarakat dari dua dusun (Dusun 2 dan Dusun 3) untuk turut serta dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove.	Pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan wisata mangrove di Desa Sigeni Selatan mencerminkan pendekatan berbasis komunitas yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam kelompok pengelola agar bisa bersama-sama menjaga kelestarian

			lingkungan wisata hutan mangrove.
Pengawasan	Pemerintah desa dalam hal ini berperan sebagai fasilitator utama dengan memberikan dukungan secara teknis serta melakukan pengawasan berkelanjutan dengan meminta laporan pertanggungjawaban tahunan dari kelompok pengelola dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang mendukung	menerapkan sistem pengawasan yang mencakup pembagian tugas yang jelas, perlindungan lingkungan, dan transparansi keuangan serta melakukan kerja sama dengan pemerintah desa untuk memperkuat pengelolaan kawasan wisata.	Dalam pengawasan pengelolaan kawasan hutan mangrove Masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan pengembangan hutan mangrove.

	keberlanjutan program.		
--	---------------------------	--	--

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Sinegritas Stakeholder Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Maotung. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai Berikut :

1. Dalam perencanaan pengelolaan wisata hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan, terdapat sinergitas antara pemerintah desa dan kelompok pengelola wisata hutan mangrove. Pemerintah Desa melakukan dukungan melalui anggaran dan fasilitas untuk pertemuan kelompok pengelola wisata hutan mangrove. Namun, perencanaan ini tidak melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan wisata, tidak diikutkan dalam tahap perencanaan, padahal mereka memiliki peran dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Tidak melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan mengurangi potensi sinergitas yang lebih luas antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat. Padahal, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan maupun pengelolaan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan program. Selain itu juga dapat meningkatkan manfaat ekonomi bagi desa serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove, penting bagi pemerintah desa untuk

melibatkan lebih aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan agar dapat memastikan pengelolaan yang inklusif, efektif, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2. Pelaksanaan pengembangan hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan menunjukkan adanya sinergitas yang baik antara pemerintah desa dan kelompok pengelola wisata. Pemerintah desa memberikan kepercayaan penuh kepada kelompok pengelola untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan kawasan wisata hutan mangrove, namun pemerintah desa tetap berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan serta melakukan pengawasan dan koordinasi.

Kelompok pengelola wisata menunjukkan tanggung jawab tinggi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan. Mereka secara rutin melaksanakan kegiatan kerja bakti dua kali seminggu, yang tidak hanya menjaga kebersihan kawasan tetapi juga mempererat hubungan antar anggota kelompok. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif ini memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan pengelolaan wisata hutan mangrove dan memperkuat sinergitas antara semua pihak yang terlibat.

Selain itu, mereka juga membangun gazebo sebagai tempat istirahat pengunjung, mushola sebagai fasilitas ibadah, serta kamar mandi yang dapat digunakan oleh wisatawan. Namun, dalam pelaksanaannya, kelompok pengelola menghadapi kendala utama berupa biaya yang cukup besar, yang menjadi tantangan dalam mengembangkan serta mempertahankan keberlanjutan wisata hutan mangrove di desa tersebut.

3. Proses pengorganisasian kelompok pengelola wisata hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan dalam proses pengelolaan kawasan wisata ini telah membuat struktur organisasi yang jelas dengan melibatkan beberapa masyarakat dari dua dusun (Dusun 2 dan Dusun 3) untuk turut serta dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove. Selain itu juga pembagian tanggung jawab yang terstruktur di dalam organisasi agar dapat cipta pengelolaan yang lebih terorganisir dan efisien, dengan masing-masing anggota memiliki peran yang jelas. Selain itu, keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada struktur kepengurusan, tetapi juga mencakup peluang ekonomi seperti berjualan di kawasan wisata, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Namun, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa dan pihak terkait, termasuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok dalam pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove hal ini dilakukan bertujuan untuk pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Pengawasan pengelolaan hutan mangrove di Desa Sigenti Selatan menunjukkan adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah desa dan kelompok pengelola wisata. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator utama, yang memberikan dukungan teknis, serta melakukan pengawasan dengan cara meminta laporan pertanggungjawaban tahunan dari kelompok pengelola untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa

pengawasan juga dilakukan oleh kelompok pengelola kawasan wisata hutan mangrove dengan cara pembagian tugas yang jelas di bidang kebersihan, keamanan, perlindungan lingkungan, serta transparansi keuangan. Mereka juga secara rutin mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas pendapatan dan memasang papan larangan untuk melindungi hutan mangrove.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan maka peneliti memberikan saran untuk Pemerintah Desa dan Kelompok Pengelola Kawasan Wisata Hutan Mangrove di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Maotung sebagai berikut :

1. Pastikan pemerintah desa di Desa Sigenti Selatan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengelolaan wisata hutan mangrove. Karena masyarakat lokal memiliki peran yang penting dalam menjaga kelestarian hutan mangrove serta dapat meningkatkan ekonomi bagi desa dan masyarakat sekitar.
2. Pemerintah desa harus terus mendukung kelompok pengelola kawasan wisata hutan mangrove dengan memberikan pelatihan, pemberian sumber daya yang lebih memadai, serta memastikan adanya evaluasi berkala terhadap pengelolaan kawasan. Selain itu kelompok pengelola Kawasan wisata hutan mangrove juga harus memperkuat komunikasi dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah desa dan kelompok pengelola agar dapat menciptakan suatu keberhasilan program yang dilaksanakan. Serta melakukan kalaborasi dengan berbagai pihak

dalam mengatasi masalah biaya yang cukup besar agar dapat membantu pembangunan wisata hutan mangrove berkelanjutan.

3. Pemerintah desa dan kelompok pengelola kawasan wisata hutan mangrove harus dapat memastikan bahwa setiap masyarakat desa mendapatkan perannya masing-masing dalam proses pengelola kawasan wisata hutan mangrove serta anggota kelompok yang terlibat dapat berkerja sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
4. Pemerintah Desa harus memastikan setiap pelaksanaan program kelompok pengelola kawasan wisata hutan mangrove berjalan dengan lancar bukan hanya dilihat dari laporan pertanggung jawaban saja tetapi dalam proses kinerja anggota kelompok pengelola perlu diperhatikan, hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove.

DAFTAR PUSAKA

Jurnal :

- Adnan Wantasen 2002. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di Indonesia. Institut Pertanian Bogor.
- Chairil Anwar dan Hendra Gunawan. 2006. Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomi Hutan Mangrove dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir. Makalah seminar di Padang 20 September 2006.
- Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal mengartikan sinergitas.
- Hadi (2011:93) stakeholders adalah semua pihak, internal, maupun external.
- Ghuffran (2012) menyatakan bahwa mangrove adalah formasi tumbuhan yang khas untuk pantai.
- Kemitraan pemerintah Daerah Dengan Kelompok Masyarakat Dalam pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. R. Raman, I Malik, H Hamru – Otoritas Jurnal Ilmu 2015
- Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Konservasi Mangrove Sebagai Upaya Mencegah Rob Dan Banjir Serta Sebagai Tempat Wisata. BE Turisno, R Suharto, EA Priyono Masalah-Masalah Hukum, 2018 ejournal.undip.ac.id
- Pengelolaan Ekowisata Taman Hutan Kota Dan Hutan Mangrove Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. N Abdullah – Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan 2023-jim.usk.ac.id.
- Persepsi Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung Terhadap Hutan Mangrove. D Iswandaru, IG Febryano – [journal of Tropical. 2021 – repository.ippm.unila.ac.id](http://journal.of.Tropical.2021-repository.ippm.unila.ac.id).
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Di kota Semarang. D. Diarto, B Hendrato, S Suryoko Jurnal lingkungan Undip, 2012
- Pengaruh Aktivitas Masyarakat Terhadap Ekosistem Mangrove Di Kecamatan Managgu. Go Rewena, CEV Wuisang, FO Siregar- Spasial, 2020 – ejournal.unsrat.ac.id

Pengaruh Aktivitas Masyarakat terhadap Kerusakan Hutan Mangrove. Majalah Geografi Indonesia, tahun 2009 jurnal ugm.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove. D Diarto, B Hendrarto, S Suryoko. Jurnal Ilmu lingkungan 20012 neliti com.

Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kudung Kabupaten Jepara B utomo, S Budiastuti. Jurnal Ilmu Lingkungan 2017.

Restorasi Hutan Mangrove Terdegradasi Berbasis Masyarakat Lokal. S Eddy, II Iskandar, MR Ridho 2019 – jurnal. Univpgri-palembang.ac.id.

Tujuan Dampak Degradasi dan Strategi Hutan Mangrove dalam Menjaga ekosistem. D Vitasari, S. Sukendah – Jurnal Ilmu Pertanian Dan Perkebunan 2023-jurnal.ugp.ac.id

Artikel :

<https://www.sigentiselatan.desa.id/>

<http://digilib.unial.co.id>

<https://id.wikipedia.com>

PANDUAN WAWANCARA

Identitas narasumber

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Jabatan/pekerjaan :

A. Sinegritas stakeholder dalam perencanaan pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan

1. bagaimana stekeholder menembangan hantun mangrove ?
2. siapa saja yang dilibatkan dalam pengembangan hutan mangrove ?
3. kerja sama apa saya yang tercapai dalam pengembangan hutan mangrove ?

B. Sinegritas stakeholder dalam pelaksanaan / aktivitas pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan

1. apakah skteholder mengalami kendala dalam pelaksanaan pengembangan hutan mangrove ?
2. bagaimana sistem pelaksanaan pengembangan hutan mangrove ?
3. aktivitas apa saja yang dilakukan stakeholder dalam pengelolaan hutan mangrove ?

C. Sinegritas stakeholder dalam pengorganisasian pengembangan hutan mangrove desa sigenti selatan

1. bagaimana konsep skeholder dalam mengembangkan hutan mangrove di pengorganisasian ini ?

2. siapa saja yang dilibatkan dalam pengorganisasian
 3. apa saja tujuan dalam pengelolaan hutan mangrove ?
- D. Sinegritas stakeholder dalam pengawasan pengembangan hutan mangrove sigenti selatan
1. bagaimana sistem pengawasan yang dilakun Stakeholder ?
 2. siapa sajaa yang dilibatkan dalam pengawasan pengembangan hutan mangrove?
 3. apa saja kendala yang dihadapi dalam pengawasan hutan mangrove ?

LAMPIRAN



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/Ak-XIII/SI/V/2010)

Jl. Tinombo 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 - Yogyakarta 55223

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MOHAMMAD HIDAYAT
No Mahasiswa : 20520079
Judul Skripsi : SINEGRITAS STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI DESA SIGENTI SELATAN KECAMATAN TINOMBO
Dosen Pembimbing : SELATA KABUPATEN PARIGI MURUT ONTO
Mulai Bimbingan : Dra B HARI SAPTANING TYAS M.Si

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
26/4-24	1. Ganti topik → fix kean 2. Buat Proposal sesuai Format 3. Kumpulkan <u>Referensi</u> terkait topik	
3/5	Buat proposal lengkap	
10/5	Cek Catatan di WA. Segera Revisi	
11/6	Perbaiki Metode Riset	
1/7	Buat Pedoman wawancara & format	
12/7	Ace ambire Ont	



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 029/PEM/J/IV/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Mohammad Hidayat
No. Mahasiswa	: 20520079
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 5 April 2024
Judul Proposal	: Pemberdayaan Warga dalam Mewujudkan Intensif Pelayanan KTP

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 April 2024

a.n. Ketua Program Studi
Sekretaris



Anafius Giawa, S.IP., M.Si



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK DEKATI
PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK DEKATI
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 588/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Kepala Desa Sigeni Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautung
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

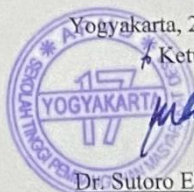
Nama : Mohammad Hidayat
No Mhs : 20520079
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Sinergitas Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Sigeni Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautung
Tempat : Desa Sigeni Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Mautung
Dosen Pembimbing : Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MAUTONG
KECAMATAN TINOMBO SELATAN
DESA SIGENTI SELATAN

SURAT KETERANGAN IZIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARSYAD
Jabatan : Kepala Desa Sigenti Selatan

Berdasarkan surat izin dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta perihal permohonan izin dengan ini kami menyetujui dan memberikan izin kepada :

Nama : MOHAMMAD HIDAYAT
NIM : 20520079

Untuk melakukan penelitian dengan judul "Sinegritas Stakeholders Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Mautong" dalam rangka penyusunan Skripsi di Desa Sigenti Selatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai semestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Sigenti Selatan



HASIL DOKUMENTASI BERSAMA INFORMAN



Pak Arsyad selaku Kepala Desa



Pak Dedy selaku sekretaris desa



Bapak Afdal selaku Nelayan



Bapak Fani selaku Nelayan



Bapak Ali sahar selaku ketua kelompok
wisata hutan mangrove



menghadiri rapat kelompok mangrove



menghadiri rapat kelompok mangrove



pintu masuk wisata kawasan mangrove



fasilitas jembatan wisata mangrove



fasilitas gazebo wisata mangrove